



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYERAPAN
ANGGARAN BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA TANGERANG
PERIODE 2017 – 2021**

Skripsi

Dibuat oleh:

Srisunu Widorini

022119184

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JANUARI 2024



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYERAPAN
ANGGARAN BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA TANGERANG
PERIODE 2017 – 2021**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Mengetahui



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph.D)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA., CMA., CCSA.,
CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYERAPAN
ANGGARAN BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA TANGERANG
PERIODE 2017 - 2021**

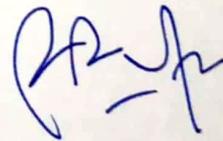
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Selasa, 30 Januari 2024

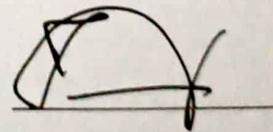
Srisunu Widorini
022119184

Disetujui,

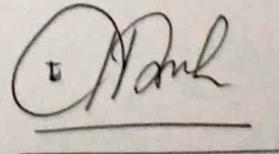
Ketua Penguji Sidang
(Dr. Rochman Marota, SE., Ak., MM., CA., CPA., CACP)



Ketua Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA)



Anggota Komisi Pembimbing
(Enok Rusmanah, SE., M.Acc)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Srisunu Widorini

NPM : 022119184

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Periode 2017 –
2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 30 Januari 2024



Srisunu Widorini
022119184

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

SRISUNU WIDORINI. 022119184. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Periode 2017-2021. Di bawah bimbingan: YOHANES INDRAYONO dan ENOK RUSMANAH. 2024.

Kegagalan target penyerapan anggaran belanja mengakibatkan adanya manfaat belanja yang hilang. Hal tersebut berarti bahwa adanya dana yang mengendap. Peristiwa penyerapan anggaran setiap tahun kondisinya hampir sama yaitu rata-rata penyerapan anggaran sangat rendah di awal tahun kemudian rata-rata penyerapan meninggi di akhir tahun. Rendahnya tingkat realisasi penyerapan anggaran berimbas pada lambatnya pembangunan suatu daerah sehingga berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tahun 2017-2021.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber dari sampel yang terpilih. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode penelitian *non*-statistik kualitatif. Observasi yang dilakukan menggunakan observasi tak terstruktur dan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tahun 2017-2021 masih kurang efektif namun sangat efisien. Rata-rata tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 69,53% yang termasuk ke dalam kriteria kurang efektif. Dan rata-rata tingkat efisiensi yang telah diperoleh sebesar 27,13% yang termasuk ke dalam kriteria sangat efisien.

Kata kunci: belanja, efektivitas, efisiensi

PRAKATA

Dengan mengucapkan segala puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga makalah skripsi ini yang berjudul "***Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Periode 2017 – 2021***" dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad ﷺ, beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

Makalah skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Makalah skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil terutama kepada:

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan nikmat sehat jasmani maupun rohani serta ridho-Nya yang luar biasa hingga saat ini kepada penulis selama penyusunan makalah proposal penelitian.
2. Abdul Kadir, S.Sos. dan Wasi Nurhandayani Selaku Orangtua yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta doa yang tak terhingga kepada penulis, sehingga dalam penyusunan proposal penelitian ini berjalan lancar.
3. Endah Kirana Siwi, S.H. dan Aura Salsabillah Abdul Selaku Kakak dan Adik yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan proposal penelitian ini.
4. Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. Selaku Rektor Universitas Pakuan.
5. Towaf Totok Irawan, S.E, M..E., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFE., CGCAE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., C.A. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bantuan dan bimbingan untuk kelancaran proposal penelitian ini.
8. Enok Rusmanah, S.E., M.Acc. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang juga telah memberikan bantuan dan bimbingan untuk kelancaran penulisan proposal penelitian ini.
9. Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSR.P., CTCP., CPSP. Selaku Wali Dosen yang telah meluangkan waktu selama proses perwalian.

10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
11. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ketulusan untuk membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
12. Teman-teman LDK DKM Al-Kautsar Universitas Pakuan yang telah memberikan motivasi penulis untuk menyelesaikan proposal penelitian ini.
13. Teman-teman Akuntansi kelas E yang melengkapi perjalanan dari awal kuliah hingga saat ini.
14. Teman-teman Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik yang pernah melengkapi pada saat semester 6.

Akhir kata, semoga penulisan proposal penelitian ini dapat diterima dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman agar menjadi lebih baik.

Bogor, Januari 2024
Penulis,

Srisunu Widorini

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
LEMBAR HAK CIPTA.....	v
ABSTRAK.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah.....	9
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	9
1.2.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Maksud Penelitian.....	9
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1 Kegunaan Praktik.....	10
1.4.2 Kegunaan Akademik.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.1.3 Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik.....	12
2.2 Anggaran.....	13
2.2.1 Pengertian Anggaran.....	13
2.2.2 Klasifikasi Anggaran.....	13
2.2.3 Siklus Anggaran.....	14
2.3 Belanja Daerah.....	15
2.3.1 Pengertian Belanja Daerah.....	15
2.3.2 Klasifikasi Belanja Daerah.....	15
2.4 Laporan Realisasi Anggaran.....	16
2.4.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran.....	16
2.4.2 Pengukuran Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran.....	17
2.4.3 Pengukuran Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran.....	18

2.5 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran.....	19
2.5.1 Penelitian Terdahulu.....	19
2.5.2 Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III. METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Objek, Unit, Analisis, Lokasi Penelitian.....	28
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	28
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	29
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	31
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.7 Metode Analisis Data.....	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.1.1 Perkembangan dan Kegiatan Usaha.....	33
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	33
4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	34
4.2 Hasil Pengumpulan Data Penelitian.....	38
4.2.1 Kondisi Laporan Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.....	39
4.3 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.....	41
4.3.1 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja.....	41
4.3.2 Analisis Efisiensi Anggaran Belanja.....	44
4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian.....	45
4.4.1 Pembahasan Efektivitas Anggaran Belanja.....	46
4.4.2 Pembahasan Efisiensi Anggaran Belanja.....	50
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	53
5.1 Simpulan.....	53
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perolehan Anggaran DPUPR Kota Tangerang.....	4
Tabel 1.2 : Laporan Realisasi Anggaran.....	5
Tabel 2.1 : Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas.....	17
Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1 : Operasionalisasi Variabel.....	29
Tabel 4.1 : Laporan Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang TA. 2017-2021.....	39
Tabel 4.2 : Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017-2021.....	42
Tabel 4.3: Rasio Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017-2021.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Grafik Tren Realisasi Belanja TA 2016-2021.....	1
Gambar 1.2 : Realisasi Anggaran Belanja DPUPR.....	6
Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual.....	27
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara.....	58
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.....	59
Lampiran 3 : Surat Jawaban Penelitian.....	60
Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2017.....	61
Lampiran 5 : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2018.....	62
Lampiran 6 : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2019.....	63
Lampiran 7 : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2020.....	64
Lampiran 8 : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2021.....	65
Lampiran 9 : Dokumentasi Saat Penelitian.....	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Rendahnya tingkat penyerapan anggaran di Indonesia merupakan fenomena yang hampir selalu terjadi setiap tahun baik itu di tingkat kementerian maupun lembaga pemerintahan. Rendahnya tingkat realisasi penyerapan anggaran berimbas pada lambatnya pembangunan suatu daerah yang diterima oleh masyarakat, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Kondisi tersebut tentunya sangat tidak menguntungkan, karena sesungguhnya APBN diharapkan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi nasional. Peran APBN juga sebagai *shock* absorber di tengah peningkatan dampak risiko global, melalui belanja negara APBN berupaya menjangkau dan melindungi seluruh masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi.



Sumber: Materi Paparan Direktur PA pada Rakernas PA 2022

Gambar 1.1 Grafik Tren Realisasi Belanja TA 2016-2021

Berdasarkan grafik di atas, realisasi belanja menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan di bulan Desember. Pola tersebut hampir sama dari tahun 2016 – 2017 dan sedikit membaik di tahun 2021. Rata-rata realisasi anggaran *non*-kumulatif (2016-2021) di triwulan I hanya mencapai 4,0 %, di triwulan II sebesar 13,4%, triwulan III sebesar 19,3%, dan triwulan IV sebesar 49,0%. Periode 2016-2019 (sebelum *COVID*-19) realisasi anggaran akhir tahun selalu di bawah 90%, dengan rata-rata realisasi *non*-kumulatif TW I – TW II – TW III – TW IV sebesar 2,1% - 12,8% - 20,0% - 47,9%. Sedangkan pada periode 2020-2021 (saat *COVID*-19) realisasi anggaran akhir tahun melebihi 90%, dengan rata-rata realisasi *non*-kumulatif TW I – TW II – TW III – TW IV sebesar 7,6% - 12,8% - 17,9% - 51,1%. Berdasarkan data yang diolah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyatakan bahwa pada tahun 2021, Provinsi Banten berada pada peringkat keempat dengan

realisasi belanja APBD terendah yaitu sebesar 20,57%. Pada Kota Tangerang penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar 78,59% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang sebelumnya sebesar 81,41%. Ketua DPRD Kota Tangerang menyatakan bahwa lemahnya penyerapan anggaran salah satunya terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.

Kegagalan target penyerapan anggaran akan berakibat pada hilangnya manfaat belanja yang berarti terjadi dana yang ‘menganggur’. Secara sederhana, jika pengalokasian suatu anggaran itu efisien meskipun terdapat keterbatasan sumber dana maka, negara masih dapat mengoptimalkan pendanaan kegiatan strategis lainnya. Jika dilihat data tentang penyerapan anggaran di setiap tahun, rata-rata penyerapan anggaran sangat rendah di awal tahun, bahkan ketika melewati triwulan kedua, realisasi belanja negara masih cukup rendah. Hal ini disebabkan instansi pemerintah yang terlalu berhati-hati ketika melakukan pengeluaran anggarannya, terutama untuk belanja modal. Sehingga terkesan lambat dan tidak optimal dalam memanfaatkan waktu.

Efek dari krisis pandemi Covid-19 yang saat ini mulai mempengaruhi situasi ekonomi saat ini juga menyebabkan pemerintah di kota/kabupaten di seluruh Indonesia memperbaiki proses mereka dalam hal kinerja daya guna dan efisiensi perekonomian. Dalam hal ini, sektor publik menjadi poin awal dalam mempelajari peran atau tugas dari efisiensi dan efektivitas, dikarenakan di dalamnya terdapat 2 (dua) aspek yang penting dalam pengelolaan pemerintahan yaitu aspek transparansi dan aspek akuntabilitas.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pada hakikatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kemampuan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien (Zain, 2018).

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tahun 2001. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kewenangan daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2014). Salah satu indikator penilaian kinerja pengelolaan fiskal suatu daerah adalah tingkat

penyerapan anggaran. Sebab, melalui tingkat serapan anggaran dapat diperoleh gambaran tentang kinerja daerah dan kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan serta bertanggung jawab (Mardiasmo, 2018).

Dalam tataran sektor publik, anggaran yaitu catatan penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama jangka waktu tertentu, menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah selama periode tersebut dan bagaimana pemerintah membiayai kegiatan tersebut (Nurul dan Muhammad, 2017). Anggaran dalam organisasi bisnis komersial atau perusahaan memiliki arti yang berbeda dengan anggaran dalam pemerintahan. Anggaran dalam organisasi pemerintahan memiliki arti lebih dari sekedar alat perencanaan, bahkan bisa dikatakan bahwa anggaran dalam pemerintahan berfungsi sebagai pengendali utama kegiatan dari organisasi pemerintahan tersebut.

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik khususnya memperhatikan yang namanya *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya (Siti, 2017). Masyarakat memiliki tujuan yang diinginkan mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Pentingnya efektivitas dan efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara *output* yang dihasilkan dan input yang digunakan serta hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil tercapai yang sesungguhnya. Efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Sedangkan efektivitas, yang memiliki makna hasil guna merupakan *support* antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan (Mahmudi, 2021).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang merupakan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang yang memiliki tugas pokok membantu Walikota atau dinas teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan kepada daerah sesuai visi, misi, dan program Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sedangkan fungsinya adalah perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pengelolaan UPT, pelaksanaan administrasi dinas dan pelaksanaan fungsi

lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Serta memiliki tujuan untuk memberikan kenyamanan terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana lingkungan, termasuk trotoar, drainase, dan sungai berkonsep wawasan lingkungan dan ramah keluarga di Kota Tangerang. Dari tugas pokok tersebut merupakan pelayanan dasar yang harus diterima setiap warga secara minimal dengan menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang merupakan salah satu dinas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sektor keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dikutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, satuan hitung dinyatakan sebagai satuan pemerintahan yang mengendalikan anggaran, aset, dan kewajiban, melaksanakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan berdasarkan catatan akuntansi yang dikelolanya.

Entitas pelaporan tingkat Pemerintah Kota Tangerang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Adapun jumlah APBD Kota Tangerang dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tahun anggaran 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Perolehan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dari APBD Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017-2021

Tahun	APBD Kota Tangerang (Rp)	Anggaran DPUPR Kota Tangerang (Rp)	Presentase Anggaran DPUPR Kota Depok terhadap APBD Kota Tangerang
2017	4.489.868.362.030,69	1.069.199.369.790,72	23,81%
2018	4.817.909.142.966,22	908.286.959.771,37	18,85%
2019	5.037.584.588.109,08	757.150.234.563,95	15,03%
2020	4.058.746.417.063,09	424.843.037.243,49	10,48%

2021	4.757.820.003.689,00	548.559.458.948,00	11,53%
------	----------------------	--------------------	--------

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tangerang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, 2023 (Data diolah Penulis)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 APBD Kota Tangerang mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah APBD Kota Tangerang sebesar Rp 4.489.868.362.030,69., jumlah anggaran untuk DPUPR sebesar Rp 1.069.199.369.790,72., presentase anggaran DPUPR terhadap APBD Kota Tangerang sebesar 23,81%. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah APBD Kota Tangerang sebesar Rp 4.817.909.142.966,22., jumlah anggaran untuk DPUPR sebesar Rp 908.286.959.771,37., presentase anggaran DPUPR terhadap APBD Kota Tangerang sebesar 18,85%. Lalu pada tahun 2019 jumlah APBD Kota Tangerang sebesar Rp 5.037.584.588.109,08., jumlah anggaran untuk DPUPR sebesar Rp 757.150.234.563,95., presentase anggaran DPUPR terhadap APBD Kota Tangerang sebesar 15,03%. Lalu berikutnya pada tahun 2020 jumlah APBD Kota Tangerang sebesar Rp 4.058.746.417.063,09., jumlah anggaran untuk DPUPR sebesar Rp 424.843.037.243,49., presentase anggaran DPUPR terhadap APBD Kota Tangerang sebesar 10,48%. Dan pada tahun 2021 jumlah APBD Kota Tangerang sebesar Rp 4.757.820.003.689,00., jumlah anggaran untuk DPUPR sebesar Rp 548.559.458.948,00., presentase anggaran DPUPR terhadap APBD Kota Tangerang sebesar 11,53%.

Pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang sebagai entitas akuntansi tentu harus memegang prinsip efektivitas dan efisiensi, sehingga anggaran belanja baik belanja modal maupun belanja operasi dapat terealisasi dengan baik. Namun demikian realitanya merujuk pada data Laporan Realisasi Anggaran DPUPR Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021 membuktikan realisasi yang tidak tercapai dari anggaran, untuk mengetahui hal tersebut dapat dikenali dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, berikut ini sajian data realisasi anggaran:

Tabel 1.2 Laporan Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Pencapaian
2017	1.069.199.369.790,72	587.132.295.012,00	54,91%
2018	908.286.959.771,37	687.361.492.111,00	75,68%
2019	757.150.234.563,95	571.488.911.614,00	75,48%
2020	424.843.037.243,49	227.621.957.488,28	53,58%
2021	548.559.458.948,00	482.672.887.107,00	87,99%

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, 2023 (Data diolah Penulis)

Semua realisasi belanja harus dicatat dalam laporan realisasi anggaran. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, akuntansi belanja disusun menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan kebutuhan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Setelah mencatat dan menyusun laporan realisasi anggaran belanja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang akan menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun kepada Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kurangnya pemanfaatan jumlah anggaran yang telah ditargetkan. Sehingga hal tersebut menunjukkan pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas PUPR masih belum sepenuhnya atau kurang dari 100%. Agar lebih jelas dalam mengetahui tingkat capaian realisasi anggaran belanja maka dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Gambar 1.2 Realisasi Anggaran Belanja DPUPR Kota Tangerang

Dilihat dari Gambar 1.1 grafik realisasi anggaran belanja diatas. Diketahui bahwa capaian realisasi anggaran belanja tidak mencapai dari target anggaran belanja karena grafik realisasi tidak menunjukkan keseimbangan dengan grafik target anggaran belanja, bila dilihat pada tahun 2017 target anggaran belanja adalah Rp1.069.199.369.790,72 lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp 908.286.959.771,37 lalu pada tahun berikutnya 2019 mengalami penurunan anggaran menjadi sebesar Rp 757.150.234.563,95 lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp 424.843.037.243,49 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan

target anggaran menjadi sebesar Rp 548.559.458.948,00. Bila melihat realisasi anggaran belanjanya dari tahun 2017 hingga tahun 2020 terlihat jelas bahwa secara keseluruhan capaiannya tidak mendekati target anggaran kecuali pada tahun 2021 hampir mendekati target anggaran belanja.

Terdapat beberapa alasan atas data atau referensi laporan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang menggunakan tahun anggaran 2017 hingga tahun anggaran 2021. Dalam rentang waktu tersebut dapat memberikan gambaran yang cukup baik tentang apa yang terjadi dalam jangka waktu tersebut. Data untuk tahun-tahun tersebut sudah cukup lengkap dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mudah diakses dan digunakan untuk penelitian. Kemudian hal ini juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif daripada hanya menggunakan data dari satu atau dua tahun. Selanjutnya menggunakan periode lima tahun tersebut dapat memberikan dasar yang baik untuk membandingkan realisasi anggaran pada saat sebelum adanya covid-19, saat adanya covid-19, dan sesudah adanya covid-19.

Adanya tuntutan agar pemerintah daerah yang harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Tangerang, menjadi kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang selaku salah satu instansi pemerintahan untuk melaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Sepanjang tahun anggaran 2017 hingga 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang ditemui kurang optimalnya dalam pelaksanaan belanja daerah yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran belanja dari jumlah anggaran yang ditargetkan. Kesenjangan ini harus segera diatasi agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan Kota Tangerang guna mencapai visi misi Kota Tangerang.

Menurut berita yang dilansir dari kabarbanten.pikiran-rakyat.com, dipublikasi 29 Desember 2022, Banten – Rendahnya serapan anggaran di 5 (lima) organisasi perangkat daerah atau OPD menjadi sorotan DPRD Banten. Kelima OPD tersebut salah satunya DPUPR yang per 23 Desember 2022 realisasinya hanya 61,87 persen. DPRD Banten berharap hal ini menjadi perhatian Gubernur Banten, sangat disayangkan jika mendapat anggaran besar namun kemampuan dalam menyelesaikan serapan anggaran tidak maksimal. Oleh karena itu, perencanaannya harus terukur dengan jelas (Muntaha, 2022).

Fenomena terkait permasalahan serapan anggaran di tingkat provinsi tidak jauh berbeda dengan di Dinas PUPR Kota Tangerang. Menurut beritatangerang.id, 15 April 2020, Tangerang – penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar 78,59% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang sebelumnya sebesar 81,41%. Ketua DPRD Kota Tangerang menyatakan bahwa

lemahnya penyerapan anggaran salah satunya terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.

Pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang sebagai entitas akuntansi tentu harus memegang prinsip efektivitas dan efisiensi, sehingga anggaran belanja baik belanja modal maupun belanja operasi dapat terealisasi dengan baik. Semua realisasi belanja harus dicatat dalam laporan realisasi anggaran. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, akuntansi belanja disusun menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan kebutuhan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Setelah mencatat dan menyusun laporan realisasi anggaran belanja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang akan menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun kepada Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat setempat, khususnya masyarakat Kota Tangerang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang sebagai salah satu instansi pemerintah wajib melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan pemerintah daerah agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan Kota Tangerang menuju terwujudnya visi dan misi Kota Tangerang.

Tiara (2021) melakukan penelitian dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Yogyakarta dari tahun 2017 – 2019 sudah maksimal dan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dikatakan berhasil dalam mengelola keuangan anggaran belanjanya. Dikatakan efektif karena rasio efektifnya berada dalam *range* antara 90% - 100%. Secara keseluruhan telah terealisasi secara optimal dan telah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanjanya sudah menunjukkan kriteria yang sangat efisien dimana rasio efisiensinya <60% yang menunjukkan BKD Provinsi DIY dapat menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

Berdasarkan atas permasalahan atau fenomena-fenomena realisasi anggaran yang kurang optimal terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, maka hal ini yang mendasari penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Periode 2017 – 2021”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Mengenai permasalahan terkait penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum Kota Tangerang tahun anggaran 2017 – 2021 diantaranya adalah menjadi salah satu penyebab penurunan serapan anggaran di Kota Tangerang. Sehingga dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang sebagai pelaksana program pembangunan Kota Tangerang. Kebutuhan masyarakat akan semakin terpenuhi jika tujuan dari program yang sudah direncanakan semakin cepat terlaksana, sehingga dibutuhkan penyerapan anggaran yang tinggi pula. Efektivitas dan efisiensi menjadi salah satu prinsip utama dalam pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah daerah. Prinsip efektivitas akan tercapai apabila pemerintah berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, prinsip efisiensi akan tercapai apabila pemerintah telah memaksimalkan anggaran belanja yang telah diturunkan dan diharapkan menghasilkan *output* yang maksimal pula.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengukuran dan analisis efektivitas anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang pada tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengukuran dan analisis efisiensi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang pada tahun 2017-2021?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai maksud untuk menganalisis kesenjangan (*gap*) yang terjadi antara pelaksanaan dengan seharusnya mengenai suatu variabel penelitian yaitu efektivitas dan efisiensi anggaran, menginformasikan hasil akhir dari penelitian, serta memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pengukuran dan analisis efektivitas anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang pada tahun 2017-2021.

2. Untuk menjelaskan pengukuran dan analisis efisiensi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang pada tahun 2017-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktik

Diharapkan penelitian ini dapat membantu memecahkan masalah serta mengantisipasi adanya permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini pada lokasi yang diteliti, serta dapat berguna untuk pihak internal dalam pengambilan keputusan manajemen meliputi Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, dan pihak eksternal yang terkait meliputi Pemerintah, masyarakat, serta pengawas.

1.4.2 Kegunaan Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi akuntansi umum dan Akuntansi Sektor Publik. Kemudian nantinya dapat memberikan informasi, wawasan, dan ilmu pengetahuan mahasiswa mengenai analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja. Dan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan pemikiran untuk lebih memperdalam ilmu pengetahuan dalam mencapai hasil yang baik serta sebagai bahan dalam penelitian lanjutan yang akan meneliti di bidang atau topik yang saling berhubungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor swasta (Bastian, 2010).

Akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kualitatif terutama yang bersifat keuangan dari instansi pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan (Halim, 2012). Sejalan dengan pengertian akuntansi sektor publik, sektor publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan dapat dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga terdapat transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang tujuannya mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba atau nirlaba (Wiratna, 2015).

Memiliki definisi yang sama dengan pengertian akuntansi secara umum hanya saja akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal (Ratmono, 2017). Dari beberapa pernyataan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan oleh lembaga pemerintahan sebagai pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut *American Accounting Association* (AAA) tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada

organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (manajemen kontrol).

- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan menggunakan sumberdaya yang menjadi wewenang dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada khalayak publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan anggaran publik. Tujuan ini terkait akuntabilitas.

Sedangkan tujuan akuntansi sektor publik itu terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi masyarakat. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakan baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan (*cost of service*) yang diberikan kepada masyarakat atas suatu layanan jasa (*charging for service*).

2.1.3 Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik

Elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut (Bastian, 2010):

- a) Perencanaan publik
- b) Penganggaran publik
- c) Realisasi anggaran
- d) Pengadaan barang dan jasa publik
- e) Pelaporan keuangan sektor publik
- f) Audit sektor publik
- g) Pertanggungjawaban publik

Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen akuntansi sektor publik antara lain:

- a. Perencanaan publik yaitu suatu usaha untuk mengantisipasi di masa yang akan datang dengan cara melakukan perencanaan yang dilandaskan pada data yang ada.

- b. Penganggaran publik yaitu penjabaran rencana anggaran mengenai pendapatan dan pengeluaran yang akan digunakan untuk belanja yang nantinya harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
- c. Realisasi anggaran yaitu pelaksanaan anggaran publik secara nyata.
- d. Pengadaan barang dan jasa yaitu suatu proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat dalam bentuk pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan.
- e. Pelaporan keuangan sektor publik yaitu hasil akhir proses akuntansi berupa laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.
- f. Audit sektor publik yaitu pengujian akuntabilitas atas laporan keuangan oleh auditor yang independen untuk memberikan opini yang jujur tentang seluruh laporan keuangan.
- g. Pertanggungjawaban publik yaitu suatu tindakan yang ditujukan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan sistem pemerintah yang berlaku.

2.2 Anggaran

2.2.1 Pengertian Anggaran

Anggaran secara umum ialah hal yang sangat penting dalam perencanaan yang disusun secara sistematis guna mencapai sasaran organisasi dan juga menjadi alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi yang akan dilaksanakan (Yenny dan Siti, 2019). Mengenai pengertian lainnya, anggaran (*budget*) merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran juga akan menjadi suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu (Nur Salim, et al, 2020).

APBD berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1947 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dikarenakan salah satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama 1 (satu) tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

2.2.2 Klasifikasi Anggaran

Dalam anggaran sebagai klasifikasinya meliputi:

1. Klasifikasi objek
2. Klasifikasi organik
3. Klasifikasi fungsional

4. Klasifikasi ekonomi
5. Klasifikasi program *performance*

Dari pengertian klasifikasi objek adalah pengelompokan pengeluaran-pengeluaran ke dalam jenis barang/jasa yang akan dibeli. Sedangkan untuk klasifikasi organik adalah pengelompokan anggaran atas kategori suatu organisasi. Klasifikasi fungsional adalah merupakan pengeluaran atas dasar fungsi-fungsi, hal ini dilakukan untuk menghilangkan adanya *overlapping* (tumpang tindih) antara tugas masing-masing organisasi. Secara garis umum, klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan pengeluaran atas dasar kelompok kegiatan fungsi dan proyek yang akan dicapai sehingga dari pengeluaran-pengeluaran anggaran nantinya dapat diukur efisiensi dan penegeasan yang dapat dijalankan. Kemudian untuk klasifikasi program *performance* merupakan bentuk perwujudan sistem anggaran (*management control*) yang dilaksanakan secara efektif dan efisien serta telah ditetapkan suatu standar untuk mempermudah penilaian hasil pelaksana pekerjaan (Mardiasmo, 2018).

2.2.3 Siklus Anggaran

Proses/siklus anggaran dapat dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:

- a. Penyusunan Anggaran

Diawali dengan pengumpulan aspirasi masyarakat sedangkan proses penyusunan kegiatan disusun oleh SKPD yang kemudian diserahkan ke kepala daerah, Sekretariat Daerah, BAPPEDA, dan BPKD (pihak eksekutif) serta DPRD (pihak legislatif). Kegiatan ini dilakukan secara tertutup di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
- b. Penetapan Anggaran

Tahapan ini dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislatif, dan akan dibahas oleh pihak legislatif selama beberapa waktu dalam proses ini, terjadi diskusi antara tim anggaran eksekutif dan panitia anggaran legislatif. Pada kesempatan ini pihak legislatif berkesempatan untuk menanyakan dasar-dasar kebijakan eksekutif dalam membahas usulan anggaran tersebut.
- c. Pelaksanaan Anggaran

Tahapan ini dimulai sejak APBD disahkan melalui peraturan daerah pada setiap akhir tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai dan berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai awal tahun anggaran baru, yakni pada bulan Januari setiap tahunnya, serta tahap ini menjadi tanggung jawab pihak eksekutif melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang jumlahnya sesuai dengan struktur organisasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- d. Tahapan Auditing (Pemeriksaan)

Tahap ini merupakan tahap penelaahan atas pelaksanaan anggaran untuk waktu satu tahun anggaran yang bersangkutan. Proses ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dan BPKP yang menjadi pemeriksa

internal, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemeriksa eksternal.

2.3 Belanja Daerah

2.3.1 Pengertian Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Pada dasarnya pengeluaran pemerintah pada awalnya harus dianalisis terlebih dahulu berdasarkan pengeluaran fungsional. Pemerintah daerah sebaiknya juga melakukan identifikasi kegiatan mana yang benar-benar masuk skala prioritas menurut ukuran kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Struktur belanja daerah terbagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penangannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (Hani dan Alen, 2018).

2.3.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Berdasarkan pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja modal yang merupakan pengeluaran anggar untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga yang merupakan pengeluaran anggaran atas bebas APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer yang merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja operasi dalam suatu APBD dirinci lagi dalam beberapa jenis berdasarkan pasal 56 pemerintah nomor 12 tahun 2019, yaitu:

- a) Belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b) Belanja barang dan jasa yang merupakan pengeluaran dalam bentuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah.
- c) Belanja bunga berupa bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Belanja jenis ini digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*), berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- d) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada BUMN/D atau badan usaha milik swasta tertentu agar harga jual produksi dan/atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat luas.
- e) Belanja Hibah yang merupakan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah memiliki peruntukannya.
- f) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2.4 Laporan Realisasi Anggaran

2.4.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang digambarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD di akhir periode. Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang dilakukan di periode mendatang. Tujuan penyusunan laporan realisasi anggaran yaitu membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu menciptakan efisien dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan dan memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas dalam belanja.

Adapun manfaat penyusunan laporan realisasi anggaran yaitu dalam laporan realisasi anggaran menyajikan informasi detail mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Informasi tersebut bermanfaat bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan

entitas pelaporan terhadap anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumberdaya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat maupun daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang mendeskripsikan perbandingan antara realisasi dengan anggaran dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: (1) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, (2) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan, (3) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Alful dan Nur, 2020).

2.4.2 Pengukuran Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan/*spending wisely* (Mahmudi, 2010). Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010)

Selain itu, efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan (Marlinda, Satriadi dkk, 2022). Di sisi lain, efektivitas merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut sudah dikatakan berjalan secara efektif. Efektivitas juga dapat dilihat dari hasil kegiatan yang telah diperoleh. Jika hasil kegiatan yang diperoleh sudah

mendekati sasaran, maka akan semakin tinggi juga efektivitasnya. Efektivitas berkaitan dengan terlaksana semua tugas-tugas pokok, ketepatan waktu, ketercapaiannya suatu tujuan, serta keberhasilan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang diperoleh, yang menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang dicapai (Tiara, 2021). Untuk mencari tingkat efektivitas yaitu melalui perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2.4.3 Pengukuran Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran

Dalam penyediaan layanan publik perlu adanya efisiensi. Maksud dari efisiensi pelayanan publik tersebut adalah bagaimana suatu pemerintah daerah tersebut dapat menggunakan keuangan daerah secara akurat dan optimal untuk menghasilkan sejumlah *output* atau layanan publik. Disediaknya sektor publik yaitu dengan tujuan untuk menghasilkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kinerja sektor publik sendiri dilihat dengan tolak ukur berapa banyak pelayanan yang diberikan dan disediakan untuk masyarakat serta bagaimana kualitas dari pelayanan yang disediakan.

Efisiensi itu sendiri memiliki hubungan yang erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*) (Mardiasmo, 2018). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.

Suatu organisasi dikatakan efisien secara teknis apabila organisasi tersebut mampu memproduksi *output* hingga mencapai tingkat produksi yang maksimal dengan menggunakan input tertentu atau organisasi tersebut mampu memproduksi *output* hingga mencapai tingkat produksi yang maksimal dengan menggunakan input seminimal mungkin, dan organisasi tersebut dalam efisiensi ekonomis menghadapi kendala besarnya harga input sehingga organisasi tersebut harus memaksimalkan penggunaan input yang tersedia sesuai dengan anggaran organisasi tersebut (Hanifah dan Dewi, 2019). Suatu organisasi dapat dikategorikan efisien tergantung dari cara manajemen memproses *input* menjadi *output*. Organisasi yang efisien adalah perusahaan yang dapat memproduksi lebih banyak *output* dibandingkan dengan pesaingnya dengan sejumlah *input* yang sama atau mengkonsumsi *input* lebih rendah untuk menghasilkan sejumlah *output* yang sama.

Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pada dasarnya efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian *output* yang maksimum dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Maka digunakan rumus sebagai berikut (Mahsun, 2009):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 Tahun 1998, tentang kriteria tingkat kinerja keuangan, penetapan tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut: (1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien, (2) Jika hasil pencapaian antara 90%-100% maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien, (3) Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien, (4) Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien, (5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien. Pasalnya efisiensi adalah salah satu kunci penting yang bisa membuat suatu program menjadi lebih lancar. Dengan melaksanakan program secara efisien, hasil yang diperoleh akan lebih maksimal dan memuaskan untuk masyarakat khususnya.

2.5 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Siti Mardiyah Ulfah, 2018, Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja pada	Efektivitas Efisiensi	Rasio Efektivitas = $\frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{anggaran penerimaan PAD}} \times 100\%$ Rasio Efisiensi = $\frac{\text{realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$	Analisis Deskriptif	Realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2015-2017 dikatakan tidak efektif Tingkat efisiensi realisasi anggaran

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2015 – 2017				di Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2015-2017 masih dikatakan cukup efisien.
2	Dwi Nofita Sari, Sri Minarti, Salma Pattisah usiwa, 2018, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda	Efektivitas dan Efisiensi	$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{realisasi anggaran belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$ $\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi anggaran belanja}}{\text{realisasi pendapatan}} \times 100\%$	Kuantitatif Komparatif	Tingkat efektivitas anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2014 cukup efektif, dan tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015 kurang efektif. Tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran tahun 2011 dikategorikan sangat efisien dan pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 dikategorikan efisien.
3	Cenissa Sajow, Jenny Morasa, Heince R. N. Wokas, 2017, Analisis Realisas	Efektivitas dan Efisiensi	$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{outcome}}{\text{output}} \times 100\%$ $\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$ $\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun} = \frac{\text{Realisasi blnj } n - \text{Realisasi Blnj } n-1}{\text{Realisasi blnj } n-1} \times 100\%$	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Tingkat efektivitas belanja Kota Tomohon lebih efektif dibandingkan dengan Kabupaten

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	i Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintahan Kota Tomohon dan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan				Minahasa Selatan. Tingkat efisiensi belanja, Kota Tomohon lebih efisien dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Keduanya menunjukkan adanya pertumbuhan belanja yang positif.
4	Fachrul A Siregar dan Fazli Syam BZ, 2017, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Deli Serdang	Efektivitas dan Efisiensi	$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{realisasi anggaran belanja}}{\text{target anggaran belanja}} \times 100\%$ $\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$	Analisis Deskriptif	Hampir semua desa yang dijadikan sampel penelitian ini memiliki rasio 100% (efektif) kecuali, Desa Medan Estate yang memiliki rasio efektivitas 69% (kurang efektif), Desa Bangun Sari memiliki rasio efektivitas 31% (tidak efektif), Desa Bintang Meriah memiliki

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					tingkat rasio efektivitas 73% (kurang efektif).
5	Ichda Apriliana Lutfi, Della Eka Safitri, Saiful Anwar, dan Nur Kabib, 2020, Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Periode 2016-2018	Efektivitas dan Efisiensi	$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$ $\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$	Deskriptif kualitatif	Rasio efektivitas anggaran pendapatan tahun 2016-2018 kinerja pemerintah Desa Kalikurmo sangat efektif dengan prosentase 100%. Sedangkan untuk rasio efisiensi anggaran belanja dinilai tidak efisien karena penggunaan dana yang boros.
6	Riki Bria Seran, 2022, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pemungutan Retribusi Terminal (Studi Kasus pada	Efektivitas dan Efisiensi	$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{realisasi pungut retribusi terminal}}{\text{target penerimaan retribusi terminal}} \times 100\%$ $\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{biaya pemungutan retribusi terminal}}{\text{realisasi penerimaan retribusi terminal}} \times 100\%$	Analisis deskriptif	Analisis rasio efektivitas penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Malaka pada tahun 2016 tidak efektif, pada tahun 2017 efektif, tahun 2018, sangat

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Unit Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Kabupaten Malaka)				efektif, tahun 2019 kurang efektif, tahun 2020, tidak efektif. Rata-rata efisiensi penerimaan retribusi terminal di Pemkab Malaka selama tahun 2016-2020 sebesar 33,07%. Secara keseluruhan dikatakan kurang efektif dalam merealisasikan penerimaan retribusi terminal selama 5 tahun terakhir
7	Luffia Yolanda, 2022, Analisis Efektivitas Penerapan <i>e-SPT</i> PPh Pasal 21 Bagi WP Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah	Efektivitas	Presentase Efektivitas Pelaporan <i>e-SPT</i> PPh Pasal 21	Penelitian Deskriptif	Penerapan <i>e-SPT</i> pada KPP Pratama Medan masih belum efektif yang disebabkan karena pelaporan <i>SPT</i> secara <i>online</i> sering terjadi <i>error database</i> dan kurang pemahannya

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					WP Badan menggunakan e-SPT.
8	Firman Alimuddin, 2021, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Efektivitas dan Efisiensi	Tingkat efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan rasio ekonomi <i>Value for Money</i>	Analisis deskriptif kuantitatif	Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang sudah efektif dan efisien.
9	M. Iqbal Suprayoga, Hendry Saladin, dan Jusman, 2020, Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat	Efektivitas	$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{realisasi anggaran belanja}}{\text{target anggaran belanja}} \times 100\%$	Analisis deskriptif kualitatif	Selama tahun 2016 hingga 2018 realisasi anggaran belanja mengalami yang namanya penurunan tingkat efektivitas namun kriteria anggaran dapat dikatakan cukup efektif. Penurunan terjadi karena terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah dan

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					ada program yang belum terealisasi secara optimal
10	Taufik Hidayat dan Eliya Isfaatun, 2022, Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan kebutuhan masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Provinsi DIY	Efisiensi dan Efektivitas	$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{realisasi pendapatan}} \times 100\%$ $\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{target belanja}} \times 100\%$	Analisis <i>mix methods</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebesar 98%. memenuhi kriteria kurang efisien, dan tingkat efektivitas rata-rata 98% termasuk dalam kategori efektif.

2.5.2 Kerangka Pemikiran

Anggaran secara umum adalah hal yang sangat penting dalam perencanaan yang disusun secara sistematis guna mencapai sasaran organisasi dan juga menjadi alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi yang akan dilaksanakan (Yenny dan Siti, 2019). Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas serta berisi estimasi mengenai apa yang dilakukan organisasi di masa yang akan datang (Alful dan Nur, 2020). Anggaran sektor

publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2018).

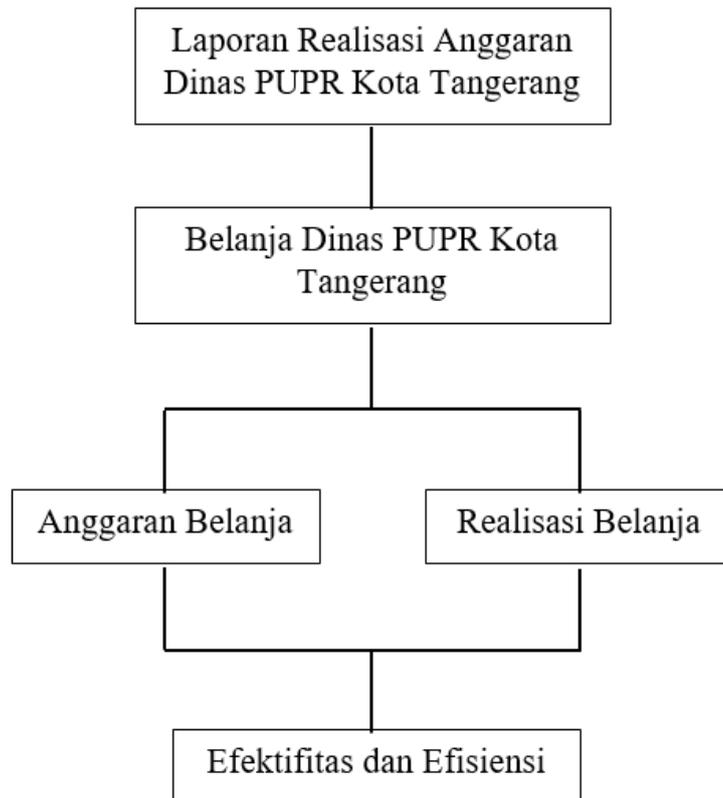
Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut ditujukan untuk membiayai program pemerintah terkait dengan fungsinya dalam menyediakan barang dan jasa publik serta tugas-tugas lainnya. Idealnya, besaran belanja langsung melampaui besaran belanja tidak langsung. Hal ini merupakan indikator kualitas belanja daerah dimana anggaran pendapatan harusnya dihabiskan lebih banyak kepada belanja langsung daripada belanja tidak langsung. Indikator lainnya adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan programnya yang dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanjanya. Namun realitanya berbeda dimana belanja tidak langsung seringkali lebih besar dari belanja langsung dan bahkan realisasi anggaran belanja langsung masih jauh dari harapan (Heru dan Muhammad, 2015). Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban suatu daerah yang dilegalkan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkaitan (Taufik, dkk, 2020).

Dalam hal untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, pemerintah melakukan penyusunan anggaran di setiap instansi pemerintahan yang mana bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Setiap instansi pemerintahan seperti badan maupun dinas memiliki anggaran belanja untuk membiayai segala operasional badan atau dinas terkait dalam rangka meningkatkan kualitas mutu suatu daerah. Dari anggaran yang sebelumnya telah disusun oleh pihak berwenang maka dihasilkan penyerapan atau realisasi anggaran suatu badan atau dinas pemerintahan. Terdapat alat untuk menganalisis kinerja SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dalam mengelola keuangan daerahnya, hal tersebut disebabkan hanya untuk membuktikan apakah kinerja SKPD dalam merealisasikan anggaran tiap periodenya sudah efisien atau efektif apa belum, hal tersebut dapat dilihat secara langsung perkembangan suatu daerah tersebut. Dengan cara melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017-2021 dengan menganalisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi.

Setelah era reformasi, Pemerintah Daerah memiliki hak otonomi daerah dengan diberi wewenang untuk menentukan peraturan dan kebijakannya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, muncul tuntutan baru agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan segala aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna)

dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Jika pengelolaannya sudah baik maka tentu saja segala program pemerintah dapat terlaksana dengan baik juga sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan pelayanan publik menjadi lebih meningkat.

Adapun konstelasi penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif yang menunjukkan fakta-fakta dari data yang diambil pada suatu objek yang diteliti dengan metode penelitian studi kasus menggunakan teknik penelitian non statistik kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menilai variabel tanpa mencari hubungan, pengaruh, atau membandingkan antar variabel (Sugiyono, 2019). Oleh karena itu, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan atau pendeskripsian secara mendalam fakta yang terjadi pada objek penelitian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengukur efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah efektivitas dan efisiensi anggaran belanja. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang. Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang yang berlokasi di Jalan Ks Tubun, Koang Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15112 dan Badan Pengelola Keuangan Daerah yang berlokasi di Jalan Satria – Sudirman No. 1, Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data berupa penjelasan kata verba yang tidak dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J dan Moleong, 2013).

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen, hasil observasi, dan wawancara dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang. Data primer adalah data yang diolah dengan cara tertentu oleh peneliti itu sendiri yang

sumbernya dari sumber pertama objek penelitian yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang saat ini sedang ditangani peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara dengan melakukan studi kepustakaan juga dengan membaca literatur – literatur yang dapat menunjang penelitian sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian ini data yang didapatkan langsung di tempat penelitian berupa sebagai berikut:

1. Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2017 – 2021. Data ini digunakan untuk mengetahui besarnya anggaran belanja dengan realisasinya yang dinyatakan dalam bentuk nilai nominal atau persentasenya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.
2. Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPUPR Kota Tangerang Tahun 2017 – 2021. Data ini digunakan untuk mengetahui informasi yang berisi capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.
3. Data hasil wawancara dengan informan atau narasumber. Data ini digunakan untuk membahas hasil analisis pengukuran efektivitas dan efisiensi.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan penjabaran dari variabel – variabel penelitian, dimensi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Bentuk operasionalisasi yang digunakan berupa definisi konseptual, indikator yang digunakan, dan alat ukur yang digunakan, perhitungan serta penilaian dari alat ukur yang menjadi operasional variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Dalam memahami penafsiran konsep yang digunakan dalam analisis dan pembahasan, beberapa konsep operasional dari variabel dalam bentuk rasio dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Periode 2017 – 2021”

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
Efektivitas	Efektivitas memiliki hubungan antara tujuan yang akan dicapai suatu instansi pemerintah dan	$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$ <p>Kriteria Efektivitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti sangat efektif. 	Rasio

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
	anggaran yang telah direncanakan dengan cara membandingkan anggaran belanja dengan realisasi belanja.	<ul style="list-style-type: none"> • Jika diperoleh nilai antara 90% sampai 100% ($90\% < x < 100\%$) berarti efektif. • Jika diperoleh nilai antara 80% sampai 90% ($80\% < x < 90\%$) berarti cukup efektif. • Jika diperoleh nilai antara 60% sampai 80% ($60\% < x < 80\%$) berarti kurang efektif. • Jika diperoleh nilai kurang dari 60% ($x < 60\%$) berarti tidak efektif. <p>Pertanyaan wawancara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jika terdapat faktor yang menghambat kinerja untuk mencapai tujuan, apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang selalu melakukan identifikasi terhadap hal tersebut? 2) Apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang selalu memiliki cara yang baru dalam melaksanakan program kegiatan setiap tahunnya? 3) Bagaimana sistem evaluasi setiap program yang telah berjalan maupun evaluasi perencanaan program yang akan datang? 	
Efisiensi	Efisiensi memiliki hubungan antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang telah tersedia sebelumnya dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja.	<p><i>Realisasi Anggaran Belanja langsung</i></p> <p><i>Realisasi Anggaran Belanja</i></p> <p>Kriteria Efisiensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika diperoleh nilai kurang dari 60% ($x < 60\%$) berarti sangat efisien. • Jika diperoleh nilai antara 60% sampai 80% ($60\% < x < 80\%$) berarti efisien. • Jika diperoleh nilai antara 80% sampai 90% ($80\% < x < 90\%$) berarti cukup efisien. • Jika diperoleh nilai antara 90% sampai 100% ($90\% < x < 100\%$) berarti kurang efisien. • Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak efisien. <p>Pertanyaan wawancara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana penggunaan anggaran belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang? Apakah sudah 	Rasio

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
		<p>menggunakan sumberdaya secara optimal?</p> <p>2) Apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang sudah melakukan pembelian barang/jasa dengan harga yang rendah namun memiliki kualitas yang tinggi?</p> <p>3) Apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang sudah menghasilkan output yang maksimal pada tahun anggaran 2017 hingga 2021?</p>	

Sumber: *Mahsun (2009)*

3.5 Metode Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Teknik *non probability sampling* ini yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini. Lebih tepatnya penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini pada bagian sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang meliputi:

1. Sub Bagian Keuangan
2. Sub Bagian Perencanaan
3. Sub Bagian Perencanaan Teknis Kebinamargaan

3.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Penelitian dilakukan dengan pendekatan langsung ke objek penelitian berupa observasi, yaitu dengan menggunakan observasi tak terstruktur dan menggunakan teknik wawancara terhadap responden yang telah terpilih yaitu menggunakan wawancara semi-terstruktur yang memiliki tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka di mana informan diminta pendapat dan idenya, serta menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari, mengkaji, dan menelaah literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan artikel yang berkaitan dengan masalah (Sugiyono, 2017). Serta data dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang berupa laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021.

3.7 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus. Tujuan dari analisis deskriptif sesuai dengan namanya yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan secara mendalam dan rinci serta objektif dari objek penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis tidak memilih topik yang tidak memiliki hubungan dengan alat analisis statistik (*non statistics*).

Penelitian ini mendeskripsikan secara mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode anggaran tahun 2017-2021 menggunakan alat analisis rasio, observasi, dan wawancara. Rasio yang digunakan yaitu rasio keuangan untuk menganalisa data seperti rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Untuk lebih jelasnya, terdapat langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai berikut (Miles dan Huberman, 2014) :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses memperoleh data yang dilakukan oleh peneliti dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun instrumen lain yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

2. Reduksi Data

Proses reduksi data yaitu merangkum, memilah hal-hal yang penting dan menghilangkan data yang tidak diperlukan oleh peneliti. Sehingga penelitian yang dilakukan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan berupa uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif, selain itu juga dapat berupa bagan, grafik untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang dikemukakan dapat dikatakan kredibel apabila kesimpulan didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten. Dengan demikian penarikan kesimpulan harus dapat menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Perkembangan dan Kegiatan Usaha

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan (DPUPR) Ruang Kota Tangerang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Selain itu, pada PERDA tersebut berisi berbagai kebijakan, strategi, rencana pengembangan, dan pengelolaan serta arahan dan peraturan zonasi wilayah Kota Tangerang. Dalam pembangunan infrastruktur dan perencanaan pemanfaatan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dalam hal pembangunan sarana dan prasarana untuk mewujudkan struktur ruang di Kota Tangerang.

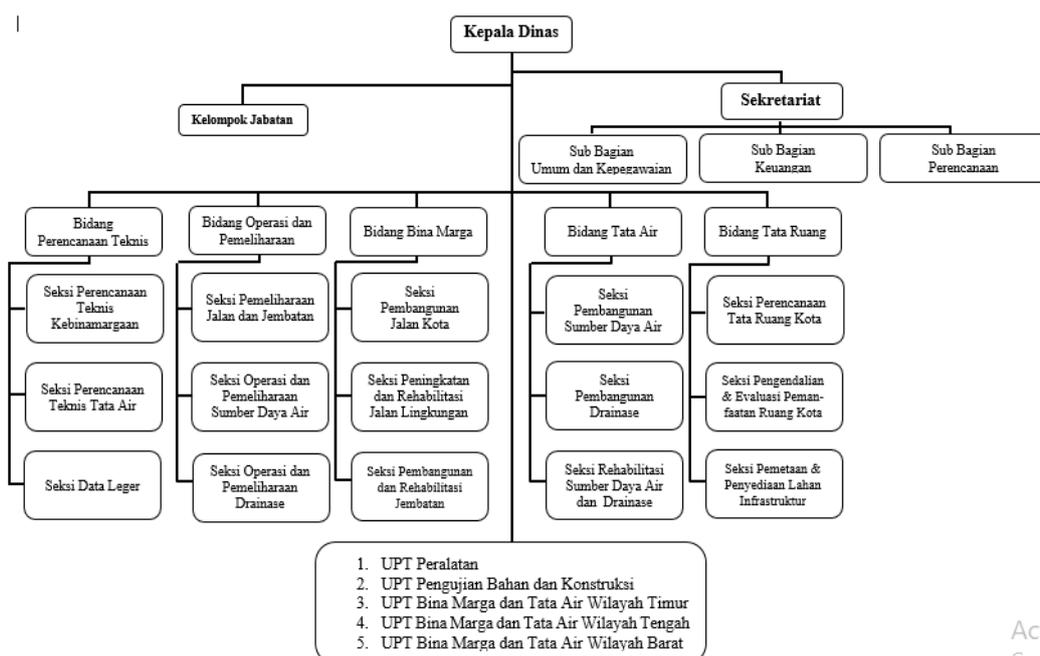
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang melaksanakan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Tangerang melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan peraturan walikota yang terbaru yaitu Peraturan Walikota Tangerang Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas membantu walikota dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan di bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, Dinas PUPR Kota Tangerang juga menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar SKPD, dan masyarakat dalam pembangunan Kota Tangerang.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 138 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan sesuai visi, misi, dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang adalah:

1. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Memberi dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
3. Membina dan melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Melaksanakan ketatausahaan dinas
5. Mengelola UPT
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, 2023

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Unsur-unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang terdiri dari:

1. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan
2. Kelompok Jabatan
3. Bidang Perencanaan Teknis

- a. Seksi Perencanaan Teknis Kebinamargaan
- b. Seksi Perencanaan Teknis Tata Air
- c. Seksi Data Leger
4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan
 - a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Drainase
5. Bidang Bina Marga
 - a. Seksi Pembangunan Jalan Kota
 - b. Seksi Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan
 - c. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
6. Bidang Tata Air
 - a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air
 - b. Seksi Pembangunan Drainase
 - c. Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Air dan Drainase
7. Bidang Tata Ruang
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota
 - b. Seksi Pengendalian & Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota
 - c. Seksi Pemetaan dan Penyediaan Lahan Infrastruktur
8. UPT Peralatan, UPT Pengujian Bahan dan Kontruksi, UPT Bina Marga dan Tata Air Wilayah Timur, Tengah, dan Barat

Tugas dan fungsi dari susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang meliputi:

1. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas pokok yaitu mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penatausahaan urusan umum.
- b. Penatausahaan urusan keuangan.
- c. Penatausahaan urusan kepegawaian.
- d. Pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas.
- e. Pengkoordinasian dalam pembangunan dan pengembangan *e-government*.
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT-UPT di lingkungan Dinas.

2. Bidang Perencanaan Teknis

Bidang perencanaan teknis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup perencanaan teknis di bidang

kebinamargaan, sumber daya air, dan drainase. Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang perencanaan teknis mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan bidang perencanaan teknis.
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana teknis di bidang kebinamargaan.
- c. Pengoordinasian dan penyusunan rencana teknis di bidang tata air.
- d. Pengoordinasian dan penyusunan data infrastruktur kebinamargaan dan tata air.
- e. Melakukan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

3. Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Bidang operasi dan pemeliharaan mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup operasi dan pemeliharaan di bidang kebinamargaan, sumber daya air, dan air limbah. Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang operasi dan pemeliharaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan bidang operasi dan pemeliharaan.
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan bidang jalan dan jembatan.
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bidang drainase.
- e. Melakukan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

4. Bidang Bina Marga

Bidang bina marga memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang bina marga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan bidang bina marga.
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan kota.
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan jalan lingkungan.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan jembatan.
- e. Melakukan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

5. Bidang Tata Air

Bidang tata air mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup pelaksanaan, pembangunan, rehabilitasi sumber daya air dan drainase sesuai kewenangan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang tata air mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan bidang tata air.
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembangunan sumber daya air.
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembangunan drainase.
- d. Pengoordinasian dan rehabilitasi sumber daya air dan drainase.
- e. Melakukan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

6. Bidang Tata Ruang

Bidang tata ruang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana tata ruang kota, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang kota (perijinan dan rekomendasi teknis), serta pemetaan dan penyediaan lahan infrastruktur. Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang tata ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan bidang tata ruang.
- b. Penyelenggaraan penyusunan rencana tata ruang kota.
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang.
- d. Penyelenggaraan pemetaan terhadap perkembangan tata ruang kota.
- e. Penyelenggaraan penyediaan lahan untuk pengembangan infrastruktur kota.
- f. Melakukan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

7. UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase

UPT (Unit Pelaksana Tugas) pemeliharaan jalan dan drainase memiliki tugas yaitu menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan mengarahkan, membimbing, melaksanakan, memelihara, mengawasi, mengoordinasi, memantau jalan dan tata air lingkungan beberapa kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya menurut pola koordinasi dengan Bidang Bina Marga dan Bidang Tata Air yang ditetapkan oleh kepala dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok, UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan di kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

- b. Pelaksanaan pembangunan, operasi, dan pemeliharaan tata air lingkungan di kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

4.2 Hasil Pengumpulan Data Penelitian

Dalam penelitian ini hanya satu variabel yang akan diteliti lebih dalam lagi. Variabel yang dimaksud yaitu efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tahun 2017-2021. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization* yaitu sumber data yang unit analisisnya terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.

Lokasi yang dituju dalam penelitian ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang yang berlokasi di Jalan Ks Tubun, Koang Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15112 dan Badan Pengelola Keuangan Daerah yang berlokasi di Jalan Satria – Sudirman No. 1, Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111. Sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk data primer ini didapatkan dari lokasi objek penelitian berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tahun 2017-2021. Sedangkan untuk data sekunder berupa data yang diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh melalui media perantara yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan literatur-literatur yang telah dibaca sebelumnya sebagai pendukung data primer.

Berdasarkan metode penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Metode ini merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel serta dengan memberikan pertimbangan tertentu. Maka sampel yang dipilih dalam penelitian ini pada bagian sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang meliputi sub bagian keuangan dan sub bagian perencanaan teknis kebinamargaan.

Pada populasi yang dipilih menjadi sampel yaitu sub bagian keuangan dan sub bagian perencanaan teknis kebinamargaan di bagian sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dikarenakan, belum terserapnya anggaran secara maksimal dan mengalami fluktuasi anggaran belanja dan realisasinya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan hasil presentase yang telah dihimpun oleh peneliti berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja sebagai berikut.

4.2.1 Kondisi Laporan Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang

Data yang didapatkan adalah Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tahun 2017-2021. Data laporan keuangan tersebut tentu diawasi secara langsung oleh Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang selaku pengawas atau pemeriksa secara independen terhadap berbagai kegiatan dan program yang dilakukan oleh instansi pemerintah serta sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal. Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang juga bertugas untuk memastikan bahwa operasi dan kegiatan di dalam instansi tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

Berkenaan yang menjadi objek penelitian ini yaitu efektivitas dan efisiensi anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang. Hal ini untuk mengukur rasio efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja dari kinerja keuangan melalui progres anggaran dan realisasinya dari tahun ke tahun. Berikut peneliti sajikan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.

Tabel 4.1 Laporan Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang TA. 2017-2021

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Sisa Anggaran Belanja (Rp)
2017	1.069.199.369.790,72	587.132.295.012,00	482.067.074.778,72
2018	908.286.959.771,37	687.361.492.111,00	220.925.467.660,37
2019	757.150.234.563,95	571.488.911.614,00	185.661.322.949,95
2020	424.843.037.243,49	227.621.957.488,28	197.221.079.755,21
2021	548.559.458.948,00	482.672.887.107,00	65.886.571.841

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, 2023 (Data diolah penulis)

Dari Tabel 4.1 di atas dapat diamati bahwasanya jumlah anggaran belanja yang dianggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang pada tahun anggaran 2017 hingga 2020 mengalami penurunan anggaran, namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2017 jumlah anggaran belanja sebesar Rp 1.069.199.369.790,72, kemudian pada tahun 2018 jumlah anggaran belanja mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 908.286.959.771,37, lalu anggaran belanja pada tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 757.150.234.563,95, berikutnya pada tahun 2020 jumlah anggaran belanja mengalami penurunan kembali

menjadi sebesar Rp 424.843.037.243,49, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan anggaran belanja menjadi sebesar Rp 548.559.458.948.

Anggaran belanja diperlukan untuk memenuhi beberapa fungsi searah dengan instruksi yang diberikan kepada suatu instansi pemerintahan. Perencanaan jangka panjang, pengendalian keuangan, pelaksanaan yang efisien, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu instansi pemerintahan terhadap publik. Anggaran belanja dibuat untuk menguraikan segala kepentingan yang akan dilakukan di masa kelak yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam satu periode tahun anggaran. Dalam suatu anggaran terdapat hal pokok yang harus dimiliki, yaitu kemampuan untuk mengontrol pengeluaran yang akan menjadi beban, alokasi sumber daya berdasarkan skala prioritas, dan penyelenggaraan kegiatan yang baik sebagai pendukung efisien dan efektivitas alokasi anggaran.

Perubahan naik dan turunnya anggaran yang diberikan mengacu pada beberapa faktor. Anggaran yang direncanakan berpedoman pada kondisi di tahun sebelumnya dan juga tahun berjalan. Kemudian asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan sumber dan besaran pendapatan daerah, serta kebijakan belanja daerah mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah.

Berikutnya dapat diketahui juga pada jumlah realisasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang pada tahun anggaran 2017-2021 setiap tahunnya mengalami fluktuasi atau perubahan naik turunnya realisasi anggaran belanja. Pada tahun 2017 jumlah realisasi anggaran belanja sebesar Rp 587.132.295.012, selanjutnya realisasi anggaran di tahun 2018 ada peningkatan realisasi anggaran menjadi sebesar Rp 687.361.492.111, kemudian pada tahun 2019 realisasi anggaran mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 571.488.911.614, berikutnya pada tahun 2020 realisasi anggaran mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp 227.621.957.488,28, dan realisasi anggaran di tahun 2021 terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 482.672.887.107.

Berdasarkan jumlah realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi, terdapat faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Dari tahun ke tahun permasalahan yang dihadapi tidak jauh berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti proses kelengkapan administrasi yang kurang lengkap menyebabkan anggaran akan terhambat, sehingga pelaksanaan realisasi kegiatan fisik sering terlambat. Namun, yang sebenarnya menjadi tolak ukur adalah dengan melihat

dengan seberapa maksimal suatu instansi dalam penggunaan anggaran untuk melaksanakan program-program kerja agar dapat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat umum.

4.3 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang

4.3.1 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja

Efektivitas merupakan hubungan antara pengeluaran dengan tujuan atau *goals* yang hendak dicapai (Mahsun, 2018). Jadi, efektivitas sendiri bukan hanya menguraikan tentang jumlah atau besarnya biaya yang telah dikeluarkan, namun lebih mengamati apakah suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya berhasil mencapai tujuannya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan melihat perbandingan *outcome* atau dampak program terhadap publik dengan hasil yang dicapai dari suatu program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Program urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang mengacu dan disusun berdasarkan pada misi Walikota Tangerang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta sumber daya aparatur.
2. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, sistem jaringan drainase, sumber daya air, dan penataan ruang.
3. Meningkatkan tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang berkualitas, berintegritas, kompeten, dan profesional untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.
5. Menurunkan banjir dan genangan.
6. Meningkatkan kualitas penataan ruang.

Kinerja pemerintah dikategorikan efektif dengan mengamati rasio tingkat efektivitas yang telah ditentukan. Jika diperoleh rasio lebih dari 100% maka dinilai sangat efektif, kemudian jika rasio yang diperoleh antara 90% hingga 100% maka dinilai efektif, berikutnya dikatakan cukup efektif apabila berada di rasio 80% hingga 90%, lalu pada rasio 60% hingga 80% dapat dinilai kurang efektif, dan dikatakan tidak efektif apabila rasio kurang dari 60%. Artinya semakin besar rasio efektif maka semakin bagus kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang mengenai penyerapan anggaran belanja untuk mengetahui efektivitas, maka dari itu dilakukan pengukuran tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang pada tahun anggaran 2017-2021. Diketahui hasil presentase efektivitas yang dihitung dari realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

1. Rasio Efektivitas Tahun 2017

$$= \frac{587.132.295.012}{1.069.199.369.790,72} \times 100\% = 54,91\%$$
2. Rasio Efektivitas Tahun 2018

$$= \frac{687.361.492.111}{908.286.959.771,37} \times 100\% = 75,68\%$$
3. Rasio Efektivitas Tahun 2019

$$= \frac{571.488.911.614}{757.150.234.563,95} \times 100\% = 75,48\%$$
4. Rasio Efektivitas Tahun 2020

$$= \frac{227.621.957.488,28}{424.843.037.243,49} \times 100\% = 53,58\%$$
5. Rasio Efektivitas Tahun 2021

$$= \frac{482.672.887.107}{548.559.458.948} \times 100\% = 87,99\%$$

Hasil perhitungan rasio efektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021 ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2017	1.069.199.369.790,72	587.132.295.012,00	54,91%	Tidak Efektif
2018	908.286.959.771,37	687.361.492.111,00	75,68%	Kurang Efektif
2019	757.150.234.563,95	571.488.911.614,00	75,48%	Kurang Efektif
2020	424.843.037.243,49	227.621.957.488,28	53,58%	Tidak Efektif
2021	548.559.458.948,00	482.672.887.107,00	87,99%	Cukup Efektif
Rata- rata			69,53%	Kurang Efektif

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, 2023 (Data diolah Penulis)

Pada perhitungan Tabel 4.2 di atas memaparkan bahwa tingkat efektivitas tertinggi diperoleh pada tahun 2021, sedangkan yang terendah berada pada tahun 2020. Pengukuran efektivitas termasuk kedalam perbandingan

senilai, yang dimaksud senilai ini apabila rasio yang diperoleh semakin besar maka semakin efektif pula kinerja anggaran pada suatu instansi. Pada tahun 2017, tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang sebesar 54,91% dengan anggaran belanja sebesar Rp 1.069.199.369.790,72 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 587.132.295.012. Selanjutnya pada tahun 2018 tingkat efektivitas anggaran belanja mengalami kenaikan menjadi 75,68% dengan penurunan anggaran belanja menjadi sebesar Rp 908.286.959.771,37 dan kenaikan realisasi anggaran belanja menjadi sebesar Rp 687.361.492.111. Kemudian di tahun 2019, tingkat efektivitas anggaran belanja mengalami adanya penurunan yang tidak terlalu signifikan menjadi 75,48% dengan penurunan anggaran belanja menjadi sebesar Rp. 757.150.234.563,95 dan penurunan pada realisasi anggaran belanja menjadi sebesar Rp 571.488.911.614. Di tahun 2020, tingkat efektivitas anggaran belanja mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 55,58% dengan penurunan anggaran juga menjadi sebesar Rp 424.843.037.243,49 sama seperti dengan realisasi anggaran mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 227.621.957.488,28. Dan pada tahun 2021, tingkat efektivitas kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 87,99% dengan peningkatan anggaran belanja pula menjadi sebesar Rp 548.559.458.948 dan juga peningkatan realisasi anggaran belanja menjadi sebesar Rp 482.672.887.107. Rata-rata tingkat efektivitas pada tahun 2017-2021 sebesar 69,53% yang termasuk ke dalam kategori kurang efektif.

Dengan adanya perbedaan anggaran dan realisasi pada setiap tahunnya maka akan memperoleh sisa anggaran, hal ini dapat menunjukkan penyerapan anggaran yang dapat mendeskripsikan kinerja organisasi dalam hal membangun sarana dan prasarana publik. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya perubahan jumlah anggaran belanja dan juga realisasinya, dikarenakan hal ini berkaitan secara langsung dengan *outcome* seperti perubahan dari jumlah anggaran belanja daerah yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah untuk belanja daerah. Belanja daerah tentunya akan berkaitan langsung dengan program-program pemerintah dalam upaya melindungi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai visi dan misi suatu daerah.

Pada setiap tahunnya permasalahan yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tidak jauh berbeda. Berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi hal tersebut seperti gagal lelang pada LPSE akibat waktu yang terbatas, terjadinya *cut-off* di tengah-tengah proses pekerjaan sehingga tidak dapat dituntaskan pada tahun tersebut, adanya efisiensi penyerapan anggaran, dan lain sebagainya. Namun, pada tahun 2020 terjadi pandemi *covid-19* yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran. Rasionalisasi anggaran ini menyebabkan anggaran-anggaran yang digunakan untuk kegiatan fisik sebagian untuk anggaran di

bidang kesehatan, sehingga banyak paket-paket pekerjaan yang tidak terlalu urgen dibatalkan.

4.3.2 Analisis Efisiensi Anggaran Belanja

Efisien berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) dapat menghasilkan *output* yang maksimal atau berdaya guna. Kemudian efisiensi juga merupakan tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses, semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Pengeluaran belanja pemerintah dapat dikatakan telah mencapai tingkat efisien apabila belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal.

Kinerja pemerintah dikategorikan efisien dengan mengamati rasio tingkat efisiensi yang telah ditentukan. Jika diperoleh rasio lebih dari 100% maka dinilai tidak efisien, kemudian jika rasio yang diperoleh antara 90% hingga 100% maka dinilai kurang efisien, berikutnya dikatakan cukup efisien apabila berada di rasio 80% hingga 90%, lalu pada rasio 60% hingga 80% dapat dinilai efisien, dan dikatakan sangat efisien apabila rasio kurang dari 60%. Artinya semakin besar rasio efektif maka semakin bagus kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang mengenai penyerapan anggaran belanja untuk mengetahui efisiensi, maka dari itu dilakukan pengukuran tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang pada tahun anggaran 2017-2021. Diketahui hasil presentase efisiensi yang dihitung dari realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

1. Rasio Efisiensi Tahun 2017
= 29,14%
2. Rasio Efisiensi Tahun 2018
= 23,75%
3. Rasio Efisiensi Tahun 2019
= 24,52%
4. Rasio Efisiensi Tahun 2020
= 46,25%
5. Rasio Efisiensi Tahun 2021
= 12,01%

Tabel 4.3 Rasio Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2017	29,14%	Sangat efisien
2018	23,75%	Sangat efisien
2019	24,52%	Sangat efisien
2020	46,25%	Sangat efisien
2021	12,01%	Sangat efisien
Rata-rata	27,13%	Sangat Efisien

Sumber: Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, 2023

Pada Tabel 4.3 diperoleh tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan tingkat efisiensi terendah terjadi pada tahun 2020. Dalam perhitungan efisiensi menyatakan bahwa semakin kecil persentase efisiensi maka dikatakan semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Pada tahun 2017 tingkat efisiensi sebesar 29,14% menjadi 23,75% pada tahun 2018, dalam sudut pandang perubahan efisiensi ini dapat dilihat sebagai peningkatan tingkat efisiensi. Pada tahun 2019 mengalami penurunan tingkat efisiensi sebesar 0,77% menjadi 24,52% dan masih termasuk ke dalam kriteria sangat efisien. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 21,73% menjadi 46,25%, tingkat efisiensi ini masuk dalam kriteria sangat efisien. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan efisiensi sebesar 34,24% menjadi 12,01% dan termasuk dalam kriteria sangat efisien.

Adanya perubahan tingkat efisiensi ini terjadi karena perubahan anggaran belanja langsung yang dilaksanakan berdasarkan program yang telah dilaksanakan berupa kegiatan-kegiatan fisik. Belanja langsung ini juga berkaitan dengan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Dari hasil persentase tingkat efisiensi yang mengalami fluktuasi, rata-rata tingkat efisiensi selama tahun 2017-2021 termasuk ke dalam kriteria cukup efisien yaitu sebesar 27,13%. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang telah melaksanakan anggaran dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan.

4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan data anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja serta hasil presentase yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang terdapat data pendukung yaitu hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yang telah ditentukan sebagai sampel yaitu salah satu pegawai yang terdapat di sub bagian keuangan tersebut. Wawancara dilakukan di Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang. Pertanyaan yang peneliti ajukan selama wawancara adalah seputar

hal yang dilakukan dalam proses penyerapan anggaran belanja agar efektif dan efisien serta kendala-kendala apa saja yang terjadi pada dinas setiap tahunnya.

Menurut narasumber berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, berkaitan mengenai anggaran, terdapat yang namanya proses perencanaan anggaran yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang. Sebelumnya, semua bidang dan UPT yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang mengusulkan anggaran yang dibutuhkan berdasarkan program sesuai dengan visi dan misi Walikota Tangerang. Kemudian, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibahas kembali sebagai finalisasi anggaran berdasarkan sektor prioritas, dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pembangunan infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang sebagai instansi yang berfokus pada pelayanan dasar sehingga tidak berfokus pada pendapatan daerah, namun hanya bergantung pada anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah. Karena hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur seluruh kota, maka dana anggaran yang diberikan merupakan dana yang cukup besar dibanding dinas-dinas yang lain. Maka dari itu, anggaran yang sudah diberikan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai program yang telah direncanakan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang khususnya.

Salah satu elemen sektor publik yaitu pelaksanaan anggaran berupa mengalokasikan seluruh *public money* dalam rangka mengubahnya menjadi program dan kegiatan yang nyata. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya pengawasan terhadap seluruh anggaran yang digunakan berdasarkan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan. Semua realisasi anggaran program kegiatan yang telah dilaksanakan, harus dilaporkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat yaitu berupa pencapaian kinerja program.

4.4.1 Pembahasan Efektivitas Anggaran Belanja

Dari hasil pengukuran pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang pada tahun anggaran 2017-2021, analisis efektivitas dilakukan untuk mengamati apakah suatu program yang dilakukan telah mencapai pada tujuan serta penggunaan anggaran yang transparan dengan menghitung penyerapan anggaran belanja. Melalui perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja yang telah diberikan. Dari tahun 2017 hingga tahun 2021, hasil perhitungan rata-rata rasio efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang berada dalam penilaian kategori kurang efektif. Berdasarkan Tabel 4.2, hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Tangerang dalam melaksanakan anggarannya belum bisa merealisasikannya secara maksimal dari anggaran yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Arifin, 2020).

Tingkat efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang pada tahun 2017-2021 senantiasa mengalami perubahan tiap tahunnya. Dapat dilihat dalam tabel 4.1, bahwa akibat terjadi ketidakefektifan tersebut, menyebabkan adanya sisa anggaran dari selisih antara anggaran dengan realisasi setiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, belum bisa direalisasikan secara optimal oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang. Sisa anggaran yang ada tidak serta merta dapat digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya, jumlah sisa anggaran yang terlalu besar mengindikasikan belum maksimalnya penggunaan anggaran belanja untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memberikan layanan publik yang lebih baik. Namun, sisa anggaran bukan berarti dana menganggur, ada banyak faktor yang menyebabkan selisih antara penerimaan dan pengeluaran perlu menjadi perhatian pemerintah. Hal yang perlu dilakukan yaitu berupa meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, memperbaiki kinerja penyerapan anggaran dan mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan. Dinas PUPR Kota Tangerang yang memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan perencanaan pemanfaatan ruang kota serta pembangunan jalan dan jembatan merupakan instansi pemerintah yang memerlukan banyak anggaran untuk melaksanakan suatu program.

Hambatan yang menyebabkan penyerapan anggaran belum terserap dengan baik di setiap tahunnya hampir sama yang terjadi. Terdapat pemutusan kontrak kerja atau *cut off* ditengah-tengah proses pengerjaan karena terdapat pekerjaan yang tidak sesuai target setelah diberi toleransi waktu sehingga menyebabkan proyek mangkrak dan hanya bisa dilanjutkan ditahun anggaran berikutnya melalui proses lelang ulang. Pada saat terjadinya *covid-19* terdapat adanya rasionalisasi anggaran, dikarenakan anggaran yang ada pada setiap instansi pemerintah difokuskan kepada Dinas Kesehatan dalam rangka penunjang anggaran kesehatan. Selain itu, terdapat kesulitan pada penyesuaian antara program pemerintah dengan warga setempat yang berbeda program sehingga membutuhkan adanya musyawarah yang cukup memakan banyak waktu. Kemudian terdapat faktor internal mengenai hambatan dalam penyerapan anggaran yang belum baik yaitu tenaga pelaksana dan pengukuran (*surveyor*)

yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan golongan jumlahnya lebih sedikit dari analisis dan perencanaan. Dan keterbatasan dana dari pemerintah untuk pelayanan pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana perumahan dan pemukiman sehingga perlu dilaksanakan bertahap dan berdasarkan pada skala prioritas. Oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang melakukan evaluasi manajemen risiko, hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan penataan ruang kota dapat berjalan dengan efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa langkah atau praktik umum dalam manajemen risiko yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang:

1. Identifikasi Risiko. Selama siklus hidup suatu proyek yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, diperlukan adanya identifikasi berbagai risiko yang kemungkinan akan terjadi. Hal tersebut dapat mencakup risiko teknis, risiko lingkungan, risiko keuangan, dan risiko terkait jadwal penyelesaian proyek.
2. Analisis Risiko. Dalam hal menentukan risiko mana yang paling penting untuk dikelola lebih lanjut setelah adanya identifikasi risiko, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang perlu mengevaluasi probabilitas terjadinya risiko dan dampaknya jika terjadi.
3. Evaluasi dan Prioritasi. Risiko yang telah dianalisis sebelumnya harus dievaluasi dan diprioritaskan berdasarkan tingkat dampak dan probabilitasnya. Selanjutnya, risiko yang memiliki dampak besar dan probabilitas tinggi akan menjadi fokus utama dalam rencana manajemen risiko.
4. Perencanaan Mitigasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang harus merancang strategi mitigasi untuk mengurangi atau mengendalikan risiko yang teridentifikasi. Hal ini mencakup penerapan teknologi dan metode konstruksi baru untuk mengurangi risiko teknis, melakukan studi dampak lingkungan yang komprehensif.
5. Implementasi Tindakan Pencegahan. Setelah strategi mitigasi diterapkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan dengan seksama selama pelaksanaan proyek. Dalam hal ini, pengawasan ketat dan koordinasi perlu dilibatkan di antara semua pihak terkait untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan dilaksanakan sesuai rencana.
6. Monitor dan Evaluasi. Manajemen risiko tidak berakhir ketika sebuah proyek dimulai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang harus secara teratur memantau pelaksanaan strategi mitigasi, menilai efektivitasnya, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Memastikan risiko yang dapat dikelola sepanjang siklus hidup proyek menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

7. Komunikasi dan Keterlibatan Stakeholder. Kunci manajemen risiko yang efektif adalah komunikasi yang terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kontraktor, konsultan, masyarakat, dan otoritas lainnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang harus memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses manajemen risiko dan memahami peran mereka dalam memitigasi risiko yang terkait dengan proyek infrastruktur dan perencanaan tata ruang Kota Tangerang.

Berikut merupakan hasil wawancara mengenai efektivitas penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang yang telah penulis lakukan:

EFEKTIVITAS

1. Jika terdapat faktor yang menghambat kinerja untuk mencapai tujuan, apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang selalu melakukan identifikasi terhadap hal tersebut?

Jawab: Ya, karena hal tersebut harus dilakukan di segala proyek yang akan dikerjakan. Identifikasi ini nantinya akan sangat penting agar kami dengan segera melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan proyek dan program berjalan dengan efektif.

2. Apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang selalu memiliki cara yang baru dalam melaksanakan program kegiatan setiap tahunnya?

Jawab: Ya tentu saja, kami berusaha untuk memperbarui dan meningkatkan program serta kegiatan dari tahun ke tahun. Karena ya kembali lagi, kita tetap mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti kebijakan pemerintah juga, selain itu yang tidak kalah penting ya mengikuti kebutuhan serta beberapa harapan masyarakat Kota Tangerang ini. Akan tetapi tidak semua kegiatan atau proyek yang mengalami pembaruan, beberapa program atau proyek mungkin tetap konsisten jika dianggap masih efektif dan juga relevan. Jika ada perubahan pun itu semua dari hasil evaluasi program sebelumnya dan adanya kebutuhan baru yang muncul.

3. Bagaimana sistem evaluasi setiap program yang telah berjalan maupun evaluasi perencanaan program yang akan datang?

Jawab: Untuk hal ini dilakukan oleh bidang Pelaporan dan Perencanaan. Secara singkatnya, evaluasi program yang telah berjalan tentu saja diawali dengan pengumpulan data laporan baik keuangan maupun yang dilapangan, kemudian membandingkan hasil kerja dengan tujuan yang telah ditetapkan apakah sudah sesuai. Selain itu, umpan balik para stakeholder juga sangat diperlukan, serta proses auditing dan ditutup dengan pelaporan dan rekomendasi. Sedangkan untuk program yang akan datang, dilakukan analisis kebutuhan dan prioritas sebagai langkah awal, kemudian melakukan

studi kelayakan, perencanaan partisipatif, penyusunan rencana kerja, *review* dan persetujuan pimpinan, serta monitoring dan penyesuaian.

Sejalan dengan wawancara diatas, diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang telah mengelola anggaran sesuai dengan rencana dan peraturan sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan selalu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di Kota Tangerang.

4.4.2 Pembahasan Efisiensi Anggaran Belanja

Dari hasil observasi yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang pada tahun anggaran periode 2017-2021, analisis efisiensi dilakukan untuk mengamati sejauh mana dalam penggunaan anggaran/sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai suatu tujuan dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Semakin kecil persentase rasio efisiensinya maka dapat dikatakan sangat efisien. Dari hasil presentase efisiensi yang dapat dilihat pada Tabel 4.3, tingkat efisiensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021 berada pada kriteria sangat efisien disetiap tahunnya. Pada tahun 2017 tingkat efisiensi sebesar 29,14%, tahun 2018 sebesar 23,75%, kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan tingkat efisiensi menjadi sebesar 24,52%, selanjutnya terjadi penurunan kembali di tahun 2020 menjadi sebesar 46,35%, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan tingkat peresentase menjadi sebesar 12,01%. Hal ini menggambarkan sangat jelas bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang telah mengalokasikan sumber daya yang ada berupa anggaran belanja daerah dengan baik dan optimal. Indikator utama mengenai hal ini adalah hasil berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang paling optimal dari pengeluaran yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang merupakan salah satu SKPD yang membutuhkan anggaran yang besar untuk menjalankan segala program. Hal ini disebabkan karena Dinas PUPR Kota Tangerang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan juga perencanaan pemanfaatan ruang. Tingkat efisiensi anggaran belanja pada Dinas PUPR Kota Tangerang tahun 2017-2021 termasuk kedalam kriteria sangat efisien yang mengartikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang telah mencapai realisasi anggaran belanja langsungnya tidak melebihi kriteria efisiensi yang telah ditetapkan. Pengeluaran anggaran yang sangat besar dalam rangka keperluan untuk pembangunan mengakibatkan adanya kebergantungan pada anggaran pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Sub Bagian Keuangan, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Tangerang sama sekali tidak berpengaruh pada peningkatan APBD khususnya belanja daerah karena memiliki sifat pelayanan dasar dalam bentuk pembangunan infrastruktur.

Pendapatan daerah yang tercatat pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, seperti yang disampaikan oleh narasumber berasal dari penyewaan lab untuk uji bahan konstruksi, hasil pengelolaan kekayaan, dan lain sebagainya. Alat berat yang merupakan aset tetap milik Dinas PUPR dapat disewakan khusus hanya kepada warga yang memerlukan saja dan tidak diperbolehkan untuk pihak swasta sehingga tidak dikenakan biaya penyewaan alat berat untuk warga setempat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh narasumber, mengenai efisiensi yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang telah melaksanakan sesuai perencanaan yang telah direncanakan oleh Sub Bagian Perencanaan Teknis dan telah mengalokasikan sumber daya yang ada sesuai kebutuhan program. Setiap pekerjaan yang dilelang dalam LPSE Kota Tangerang (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berdasarkan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sehingga tidak boleh melebihi dari harga yang ada. Kemudian dalam hal pembelian barang dan jasa, ditetapkan harga sesuai standar baku yang telah ditetapkan sebelumnya yang berfokus pada Standar Satuan Harga (SSH) belanja sesuai keputusan Walikota Tangerang.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa hasil perhitungan rasio efektivitas kinerja penerimaan PAD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Mangelang tahun 2018 pada realisasi penerimaan PAD berjalan sangat efektif yang menunjukkan presentase sebesar 153,7%. Dan dari segi efisiensi belanja memperoleh hasil cukup efisien karena hasil perhitungan menunjukkan presentase 86,45% atau kurang dari 90% rasionya. Selain itu penelitian tersebut juga membahas tentang analisis varians belanja, analisis Rasio Belanja Operasi (RBO), analisis Rasio Belanja Modal (RBM) (Tatik dan Rizky Rizaldi, 2020). Berbeda dengan penelitian ini, untuk mengukur kinerja anggaran belanja hanya membahas tentang rasio efektivitas dan rasio efisiensi secara total dilihat dari anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.

Berikut merupakan hasil wawancara mengenai efisiensi penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang yang telah penulis lakukan:

EFISIENSI

1. Bagaimana penggunaan anggaran belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang? Apakah sudah menggunakan sumber daya secara optimal?

Jawab: Ya *insyaallah* sudah, karena kita melakukan pekerjaan fisik yang telah dilelang sebelumnya dalam LPSE. Penggunaan anggaran kita juga *insyaallah* sudah mengikuti prosedur dan prinsip pengelolaan yang cukup ketat. Dan kita juga memastikan bahwa penggunaan anggaran belanja dan juga sumber daya dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat khususnya masyarakat Kota Tangerang.

2. Apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang sudah melakukan pembelian barang/jasa dengan harga yang rendah namun memiliki kualitas yang tinggi?

Jawab: Ya sudah karena untuk pembelian barang itu sudah ada spesifikasinya. Untuk masalah harga, didalam pelelangan tentu saja ada yang namanya harga penawaran, maka dari itu kita memilih mana tender yang memiliki penawaran paling kecil atau terendah dengan kualitas atau spesifikasi yang telah ditentukan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Secara keseluruhan, meskipun kami berusaha untuk mendapatkan barang/jasa dengan harga yang rendah dan kualitas yang tinggi, keberhasilan dalam hal ini akan sangat bergantung pada penerapan praktik pengadaan yang baik, pemilihan penyedia yang tepat, serta pemantauan dan evaluasi yang kami lakukan terus-menerus.

3. Apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang sudah menghasilkan *output* yang maksimal pada tahun anggaran 2017 hingga 2021?

Jawab: Ya *insyaallah* sudah memaksimalkan anggaran yang ada. Namun, pada tahun 2020 hingga 2021 terdapat adanya rasionalisasi anggaran karena adanya *covid-19*, sehingga sebagian anggaran-anggaran untuk pekerjaan fisik yang telah kami anggarkan dialihkan ke Dinas Kesehatan. Banyak paket-paket pekerjaan yang anggarannya dialihkan untuk vaksin contohnya, namun tetap ada proyek-proyek urgensi yang tetap berjalan.

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa anggaran telah direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana anggaran dan peraturan sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan selalu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana khususnya di Kota Tangerang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian serta wawancara yang telah peneliti laksanakan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengalokasian anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang selama lima tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki rata-rata presentase tingkat efektivitas sebesar 69,53% yang termasuk ke dalam kriteria kurang efektif yang artinya anggaran yang direalisasikan belum mncapai anggaran yang telah ditetapkan.
2. Pengalokasian anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang selama lima tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki rata-rata presentase tingkat efisiensi sebesar 27,13% yang termasuk ke dalam kriteria sangat efisien yang artinya realisasi anggaran belanja langsung tidak melebihi realisasi anggaran yang ada, selalu ada penghematan anggaran disetiap anggaran yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat membandingkan kinerja keuangan instansi pemerintah yang memiliki potensi besar dalam mengelola keuangannya, sehingga hasil penelitian lebih memiliki kontribusi yang jelas. Kemudian dalam penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode analisis yang lebih bervariasi seperti ditambahkan analisis ekonomis untuk pengukuran nilai penghematan yang berhasil dilakukan dan tidak berfokus pada konsep *value for money* untuk menganalisis penyerapan anggaran. Serta diperinci kembali berdasarkan jenis belanjanya di bagian belanja operasi dan juga belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Basariyah, S. (2017). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal* [online]. Tersedia di: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/> [Diakses 17 Maret 2023]
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Berita Tangerang 1, 15 April 2020, “DPRD Minta Pemkot Lebih Matang Rencanakan Pembangunan”. Tersedia di: <https://beritatangerang.id/dprd-minta-pemkot-lebih-matang-rencanakan-pembangunan/> [Diakses 08 Juni 2023]
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Dasmar, T., dkk. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal* [online]. Tersedia di: <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/view/10788> [Diakses 30 Mei 2023]
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia*. 2014. Jakarta: DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fajar, N. Dan Arfan M. (2017). Analisis Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. *Jurnal* [online]. Tersedia di: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/tra> [Diakses 15 Maret 2023]
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hatimatunnisani, H. dan Dereas Putri, A. (2018). Pengaruh Realisasi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah di Kecamatan Sukasari Bandung Periode 2011-2016. *Jurnal* [online]. Tersedia di: <https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/article/view/322/191> [Diakses 03 April 2023]
- <https://dpupr.tangerangkota.go.id/> [Diakses 10 April 2023]
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010> [Diakses 05 Mei 2023]
- https://ppid.tangerangkota.go.id/daftar_informasi [Diakses 11 Mei 2023]
- Laila Rosyidah, A. dan Handayani, Nur. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal* [online]. Tersedia di: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2294> [Diakses 05 Mei 2023]
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.

- Mahmudi. (2021). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STM YKPN
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
- Miles, M. dan Huberman, M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muntaha, I. (2022). Serapan Anggaran 5 OPD Rendah, Fraksi PKS dan Gerindra DPRD Banten Kompak Bilang Begini. KabarBanten.com. Tersedia di: <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-596028876/serapan-anggaran-5-opd-rendah-fraksi-pks-dan-gerindra-dprd-banten-kompak-bilang-begini> [Diakses 13 Januari 2023]
- Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Nur Salim, D., et al. (2020). *Effect of Flexible Budget in Making Decision (Study Case: PT. ES TONASA)*. *Jurnal* [online]. Tersedia di: <http://journal.yrpiqkw.com/index.php/raj> [Diakses 14 Desember 2023]
- Peraturan Pemerintah. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Rahmi, H. dan Zaini Putri, D. (2019). Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Selama Krisis Global di Indonesia. *Jurnal* [online]. Tersedia di: <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/view/6174> [Diakses 22 April 2023]
- Ratmono, D. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rinda Rifani, T. (2021). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2019*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Rusmana, O., dkk. (2019). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tatik dan Rizaldi, M. Rizky, (2020). Analisis Rasio Keuangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Di dalam: *Seminar Nasional Akuntansi (SENA) III Universitas Pamulang*. Kota: Tangerang Selatan.

- Yakub Sulistyawati, Y. dan Afidatul Khotijah, S. (2021). Penerapan anggaran Belanja Terhadap Kinerja Operasional di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. *Jurnal* [online]. Tersedia di: <https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta> [Diakses 15 April 2023]
- Zain, W. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value for Money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. *Jurnal* [online]. Tersedia di: <https://eprints.unm.ac.id> [Diakses 14 Desember 2023]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Srisunu Widorini
- Alamat : Perumahan Kartika No.12C RT.004/RW.002
Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bogor
Barat, Kota Bogor
- Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Agustus 2000
- Agama : Islam
- Pendidikan :
- SD : SD Negeri Ngupasan Purworejo
 - SMP : SMP Negeri 31 Purworejo
 - SMA : SMA Negeri 3 Purworejo
 - Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 30 Januari 2024

Peneliti,



Srisunu Widorini

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Pertanyaan Wawancara

Nama Narasumber :

Jabatan Narasumber :

Tanggal dan Waktu :

EFISIENSI

- 1) Bagaimana penggunaan anggaran belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang? Apakah sudah menggunakan sumberdaya secara optimal?
- 2) Apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang sudah melakukan pembelian barang/jasa dengan harga yang rendah namun memiliki kualitas yang tinggi?
- 3) Apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang sudah menghasilkan *output* yang maksimal pada tahun anggaran 2017 hingga 2021?

EFEKTIVITAS

- 1) Jika terdapat faktor yang menghambat kinerja untuk mencapai tujuan, apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang selalu melakukan identifikasi terhadap hal tersebut?
- 2) Apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang selalu memiliki cara yang baru dalam melaksanakan program kegiatan setiap tahunnya?
- 3) Bagaimana sistem evaluasi setiap program yang telah berjalan maupun evaluasi perencanaan program yang akan datang?

ANGGARAN

- 1) Mengacu pada apa penyajian laporan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang?
- 2) Apakah ada prioritas khusus terkait pembelajaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tiap tahunnya?
- 3) Bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dalam memilih SDM agar penyerapan anggaran dapat berjalan secara efektif dan efisien?
- 4) Bagaimana tanggapan Saudara terkait realisasi anggaran jika dilihat dari tahun anggaran 2017 hingga 2021?

LAMPIRAN 2 : Surat Izin Penelitian

Active
Go to



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"
Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 1396 /WD.1/FEB-UP/XII/2023 21 Desember 2023
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

Kepada : Yth. Pimpinan / Direktur
 KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG KOTA TANGERANG
 Jl. Ks. Tubun, Rt.002/Rw.004, Kel. Koang Jaya, Kecamatan Karawaci
 Kota Tangerang, Banten 15112.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah penelitian skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data, pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Srisunu Widorini
 NPM : 022119184
 Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan




Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
 Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id

LAMPIRAN 3 : Surat Jawaban Penelitian

	<p>PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG JL. KS. TUBUN NO. 96 TELP. (021) 5534067 FAX. (021) 55771508 T A N G E R A N G</p>
Tangerang, 27 Desember 2023	
Nomor : 800/3497-PUPR/2023 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : Surat Jawaban Penelitian	Kepada Yth. : Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting) di - D i - T e m p a t
<p>Dengan Hormat,</p> <p>Menerangkan bahwa:</p> <p style="margin-left: 40px;">Nama : Srisunu Widorini</p> <p style="margin-left: 40px;">NPM : 022119184</p> <p style="margin-left: 40px;">Program Studi : Akuntansi</p> <p>Berdasarkan surat yang kami terima dari Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswa bersangkutan telah disetujui untuk melakukan penelitian pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang sebagai syarat penyusunan makalah penelitian skripsi.</p> <p>Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan Terima kasih.</p>	
Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS  DR. Eng. Ir. RUTA IRENG WICAKSONO, ST, MEng Fardina Tingkat I, IV/B NIP. 197704082003121006	
	Catatan: Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

LAMPIRAN 4 : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam rupiah)						
NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016 (Audited)
1	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		0,00	2.989.663.850,00	#DIV/0!	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah				#DIV/0!	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			2.989.663.850,00	#DIV/0!	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		0,00	2.989.663.850,00		
	JUMLAH PENDAPATAN					
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI		127.322.120.423,86	99.555.125.103,00	78,19%	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai		32.568.191.334,00	17.150.898.801,00	52,66%	
2.1.2	Belanja Barang		94.752.929.089,86	82.404.226.302,00	86,97%	
2.2	BELANJA MODAL		941.877.249.366,86	487.577.169.909,00	51,77%	0,00
2.2.1	Belanja Tanah		97.522.236.437,00	7.653.804.074,00	7,85%	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin		15.265.450.000,00	14.648.312.135,00	95,96%	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		500.000.000,00	421.175.000,00	84,24%	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		828.589.562.929,86	464.853.878.700,00	56,10%	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya					
2.2.6	Belanja Aset Lainnya					
	JUMLAH BELANJA		1.069.199.369.790,72	587.132.295.012,00	54,91%	0,00
	SURPLUS/DEFISIT		-1.069.199.369.790,72	-584.142.631.162,00	54,63%	0,00

LAMPIRAN 5 : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2018

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017						
NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017 (Audited)
						(dalam rupiah)
1	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		0,00	1.787.218.471,00	#DIV/0!	2.989.663.860,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah		0,00	52.240.000,00	#DIV/0!	2.989.663.860,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Ditaskakan		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		0,00	1.734.978.471,00	#DIV/0!	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		0,00	1.787.218.471,00	#DIV/0!	2.989.663.860,00
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI		140.486.357.723,59	126.613.316.846,00	90,12	99.555.125.103,00
2.1.1	Belanja Pegawai		19.636.062.250,59	18.736.213.163,00	95,91	17.150.898.801,00
2.1.2	Belanja Barang		120.850.295.473,00	107.877.103.683,00	89,18	82.404.226.302,00
2.2	BELANJA MODAL		767.791.602.047,78	560.748.175.265,00	73,03	487.577.169.909,00
2.2.1	Belanja Tanah		267.276.287.917,78	99.876.739.497,00	37,37	7.653.804.074,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin		22.595.859.734,00	11.378.844.643,00	50,36	14.648.312.136,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		1.806.000.000,00	1.795.277.000,00	99,41	421.175.000,00
2.2.4	Belanja Jalan, Jembatan, Lintang		476.113.444.398,00	447.697.314.125,00	94,03	464.853.878.700,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	JUMLAH BELANJA		908.286.969.771,37	687.361.492.111,00	75,68	587.132.295.012,00
	SURPLUS/DEFISIT		-908.286.969.771,37	-685.574.273.640,00	75,48	-584.142.831.162,00

Tangerang, 31 Desember 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DRS. H. TATANG SUTISNA, MM
PEMBINA
NIP. 19650112 199803 1 004

LAMPIRAN 6 : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018					
NO	URAIAN	REF	Rp		(dalam rupiah) REALISASI 2018 (Audited)
			ANGGARAN 2019	REALISASI 2019 (Audited)	
					%
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		389.883.495,00	230.183.984,00	59,04
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah		389.883.495,00	43.360.000,00	11,12
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		0,00	186.823.984,00	#DIV/0!
	JUMLAH PENDAPATAN		389.883.495,00	230.183.984,00	59,04
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI		137.816.521.644,21	123.550.214.799,00	89,65
2.1.1	Belanja Pegawai		19.102.060.182,21	18.903.151.278,00	98,96
2.1.2	Belanja Barang		118.714.461.462,00	104.647.063.521,00	88,15
2.2	BELANJA MODAL		619.333.712.919,74	447.938.696.815,00	72,33
2.2.1	Belanja Tanah		154.470.713.961,74	30.971.134.725,00	20,05
2.2.2	Belanja Pemeliharaan dan Mesin		46.164.136.900,00	35.393.304.930,00	76,67
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		500.000.000,00	498.275.000,00	99,66
2.2.4	Belanja Jalan, Jembatan dan Jernigan		418.192.862.058,00	381.075.462.160,00	91,12
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		6.000.000,00	520.000,00	8,67
2.2.6	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	#DIV/0!
	JUMLAH BELANJA		757.150.234.563,95	571.488.911.614,00	75,48
	SURPLUS/DEFISIT		-756.760.351.068,95	-571.298.727.630,00	75,49

Tangerang, 8 Februari 2019

KEPALA DINAS

DECKY F. KOESRINDARIONO M. SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197004031996031096

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAMPIRAN 7 : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2020

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020 (Audited)	%	(dalam rupiah)	
						REALISASI 2019 (Audited)	REALISASI 2019 (Audited)
1	PENDAPATAN						
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		200.000.000,00	1.162.575.400,00	581,29	230.183.984,00	230.183.984,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah		200.000.000,00	1.148.895.400,00	574,45	43.560.000,00	43.560.000,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		0,00	13.680.000,00		186.823.984,00	186.823.984,00
	JUMLAH PENDAPATAN		200.000.000,00	1.162.575.400,00	581,29	230.183.984,00	230.183.984,00
2	BELANJA						
2.1	BELANJA OPERASI		119.544.093.852,00	110.697.483.382,00	92,60	123.550.214.799,00	123.550.214.799,00
2.1.1	Belanja Pegawai		20.579.365.024,00	19.705.744.914,00	95,75	18.903.151.278,00	18.903.151.278,00
2.1.2	Belanja Barang		98.964.728.828,00	90.991.738.468,00	91,94	104.647.063.521,00	104.647.063.521,00
2.2	BELANJA MODAL		305.298.943.391,49	116.924.474.106,28	38,30	447.938.696.815,00	447.938.696.815,00
2.2.1	Belanja Tanah		179.056.719.111,49	30.543.491.117,00	17,06	30.971.134.725,00	30.971.134.725,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin		5.321.504.950,00	4.769.166.200,00	89,62	35.393.304.930,00	35.393.304.930,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		598.175.000,00	592.407.000,00	99,04	498.275.000,00	498.275.000,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		120.322.544.330,00	81.019.409.789,28	67,34	381.075.462.160,00	381.075.462.160,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA		424.843.037.243,49	227.621.957.488,28	53,58	571.488.911.614,00	571.488.911.614,00
	SURPLUS/DEFISIT		-424.643.037.243,49	-226.459.382.088,28	53,33	-571.258.727.630,00	-571.258.727.630,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, Februari 2021

KEPALA (NAMA SKPD)

BECKY P. KOESINDARTONO, MSc
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19700403 199603 1 006

LAMPIRAN 8 : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2021

 PEMERINTAH KOTA TANGERANG 1.03.0.000.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 (dalam rupiah)						
NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020 (Audited)
1	PENDAPATAN		1.422.274.514,00	1.811.519.125,00	127,37	1.162.575.400,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1.422.274.514,00	1.811.519.125,00	127,37	1.162.575.400,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		0,00	0,00		0,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah		1.422.274.514,00	1.811.519.125,00	127,37	1.148.895.400,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00		0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		0,00	0,00		13.680.000,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00		0,00
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN		0,00	0,00		0,00
1.2.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak		0,00	0,00		0,00
1.2.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam		0,00	0,00		0,00
1.2.1.3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00		0,00
1.2.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		0,00	0,00		0,00
1.2.1.5	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		0,00	0,00		0,00
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA		0,00	0,00		0,00
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00		0,00
1.2.2.2	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00		0,00
1.2.2.3	Dana Keistimewaan		0,00	0,00		0,00
1.2.2.4	Dana Desa		0,00	0,00		0,00
1.2.3	TRANSFER ANTAR DAERAH		0,00	0,00		0,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00		0,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		0,00	0,00		0,00
1.2.3.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota		0,00	0,00		0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		0,00	0,00		0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah		0,00	0,00		0,00
1.3.2	Dana Darurat		0,00	0,00		0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00		0,00
2	BELANJA		548.559.458.948,00	482.672.887.107,00	87,99	227.621.957.488,28
2.1	BELANJA OPERASI		141.900.382.541,00	129.232.319.348,00	91,07	110.697.483.382,00
2.1.1	Belanja Pegawai		21.630.774.330,00	20.660.494.814,00	95,51	19.705.744.914,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa		120.269.608.211,00	108.571.824.534,00	90,27	90.991.738.468,00
2.1.3	Belanja Bunga		0,00	0,00		0,00
2.1.4	Belanja Subsidi		0,00	0,00		0,00
2.1.5	Belanja Hibah		0,00	0,00		0,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00		0,00
2.2	BELANJA MODAL		406.659.076.407,00	353.440.567.759,00	86,91	116.924.474.106,28
2.2.1	Belanja Modal Tanah		68.425.768.810,00	54.249.133.671,00	79,28	30.543.491.117,00
2.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin		2.428.206.362,00	2.305.350.700,00	94,94	4.769.166.200,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		468.990.000,00	397.135.000,00	84,68	592.407.000,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi		335.336.111.235,00	296.488.948.388,00	88,42	81.019.409.789,28
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00		0,00
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00		0,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA		0,00	0,00		0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga		0,00	0,00		0,00
3	TRANSFER		0,00	0,00		0,00
3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		0,00	0,00		0,00
3.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		0,00	0,00		0,00
3.1.2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa		0,00	0,00		0,00
3.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		0,00	0,00		0,00
3.2.1	Transfer Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00		0,00
3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		0,00	0,00		0,00
3.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		0,00	0,00		0,00
3.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00		0,00
	SURPLUS/DEFISIT		-547.137.184.434,00	-480.861.367.982,00	87,89	-226.459.382.088,28
4	PEMBIAYAAN		0,00	0,00		0,00
4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00		0,00
4.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00		0,00
4.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00		0,00
4.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00		0,00
4.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00		0,00
4.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00		0,00
4.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00		0,00
4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00		0,00
4.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00		0,00
4.2.2	Penyerahan Modal Daerah		0,00	0,00		0,00
4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00		0,00
4.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00		0,00
4.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00		0,00
	PEMBIAYAAN NETO		0,00	0,00		0,00
4.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		-547.137.184.434,00	-480.861.367.982,00		-226.459.382.088,28

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, 18 Februari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

DECKY P. KOESRINDARTONO, M.Sc.
IV/b (Pembina Tingkat I)
NIP. 197004031996031000

LAMPIRAN 9 : Dokumentasi Saat Penelitian

